



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI JAWA TENGAH**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



TNP2K

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI JAWA TENGAH**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: 3.bp.blogspot.com, anakkebo.files.wordpress.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	28
Prioritas Bidang Kesehatan	31
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	33
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	36
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	37
PNPM Mandiri.....	39
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	41
Keuangan Daerah.....	44

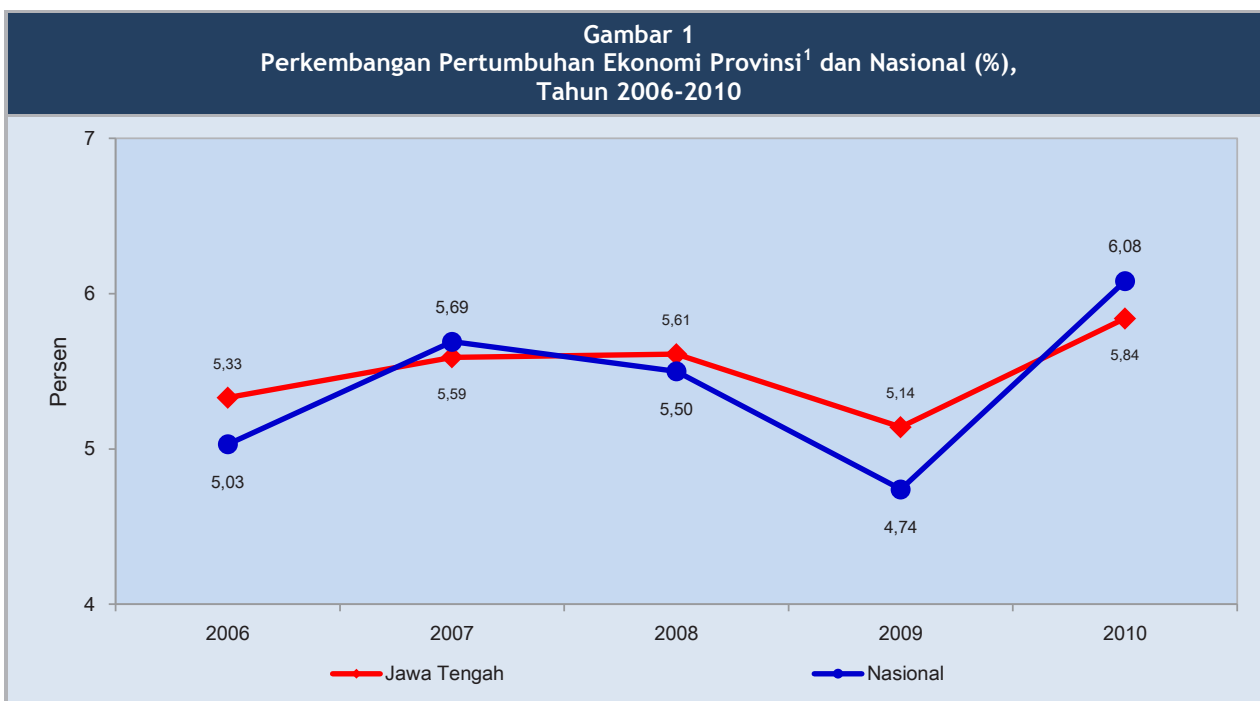


DAFTAR GAMBAR

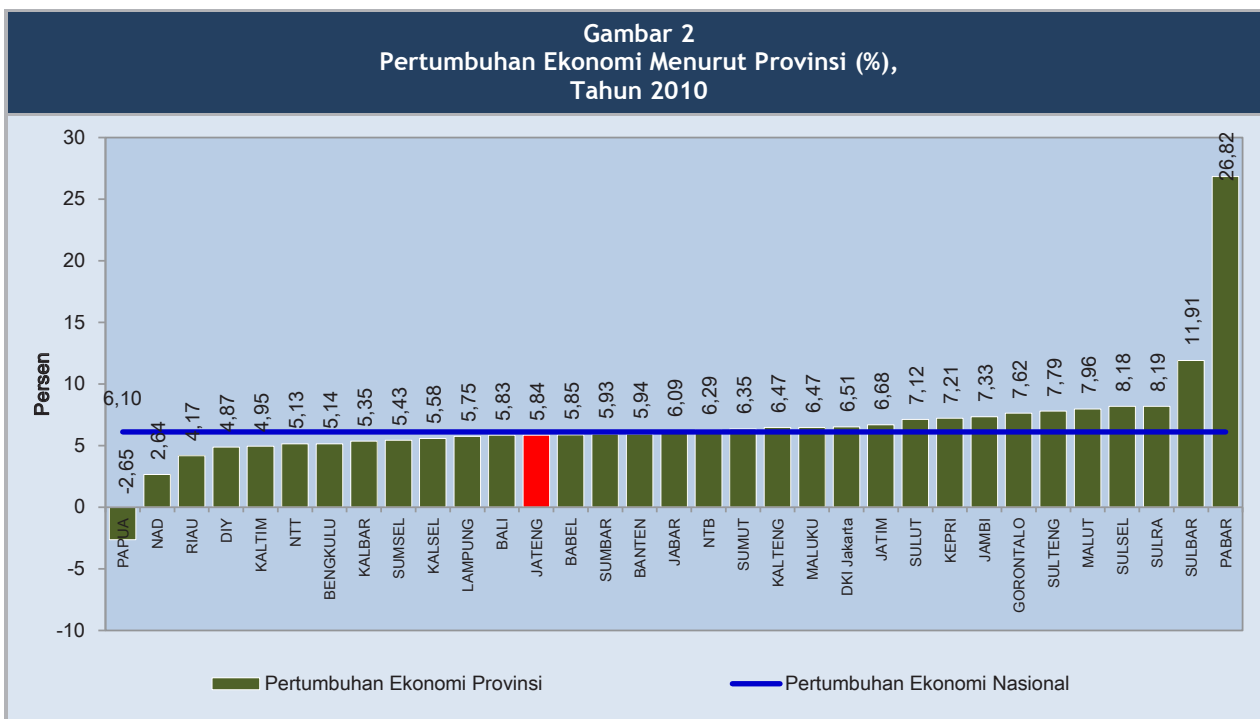
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Jawa Tengah (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Sereal per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Jawa Tengah, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2009

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	71,13	79,34	86,37	33,48	34,10	34,96	5,1	1,84	2,51
Pertambangan Dan Penggalian	3,51	3,85	4,30	1,85	1,95	2,09	3,8	5,49	7,09
Industri Pengolahan	120,07	130,35	146,16	53,16	57,44	61,39	4,5	8,06	6,87
Listrik. Gas & Air Bersih	3,74	4,11	4,65	1,40	1,49	1,61	4,8	6,04	8,42
Bangunan	21,20	24,45	27,12	9,65	10,30	11,01	6,5	6,77	6,93
Perdagangan. Hotel & Restoran	71,62	78,26	87,00	35,63	37,77	40,06	5,1	6,01	6,06
Pengangkutan & Komunikasi	21,87	23,84	26,30	8,66	9,19	9,81	7,5	6,18	6,66
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	12,62	14,45	15,90	6,22	6,70	7,04	7,8	7,78	5,02
Jasa - Jasa	37,19	39,25	46,60	17,74	17,72	19,03	7,7	(0,10)	7,37
Produk Domestik Regional Bruto	362,94	397,90	444,40	167,79	176,67	187,00	5,61	5,14	5,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.

Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010
(Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	36,84	39,27	37,04	37,8	35,53
Pertambangan Dan Penggalian	0,86	0,61	0,77	0,56	0,74
Industri Pengolahan	17,48	16,73	16,78	17,33	17,81
Listrik. Gas & Air Bersih	0,14	0,15	0,18	0,13	0,12
Bangunan	6,51	5,21	6,49	4,81	6,62
Perdagangan. Hotel & Restoran	21,05	20,79	21,86	21,76	21,43
Pengangkutan & Komunikasi	4,63	4,43	4,3	4,29	4,2
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	1,09	1,03	0,98	0,95	1,14
Jasa - Jasa	11,4	11,77	11,6	12,36	12,41

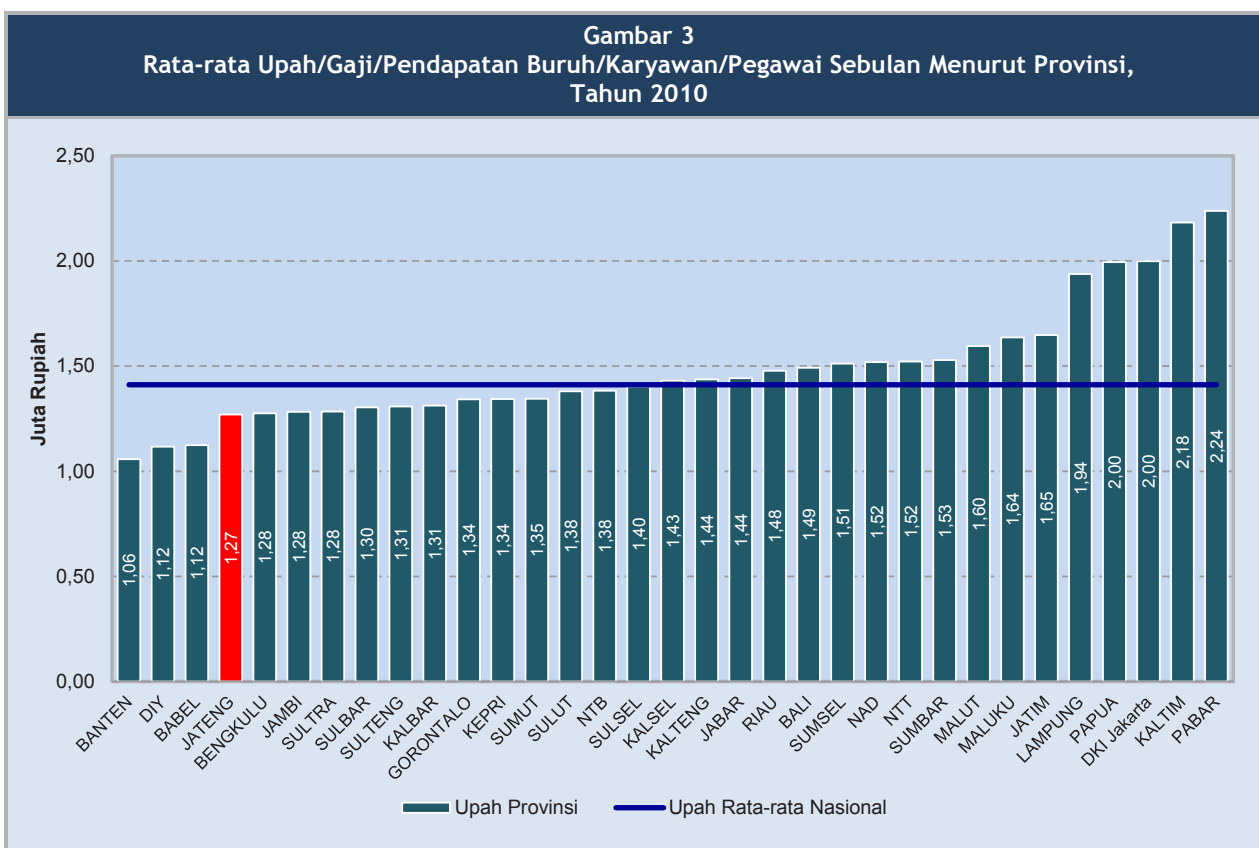
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009 (Persen)

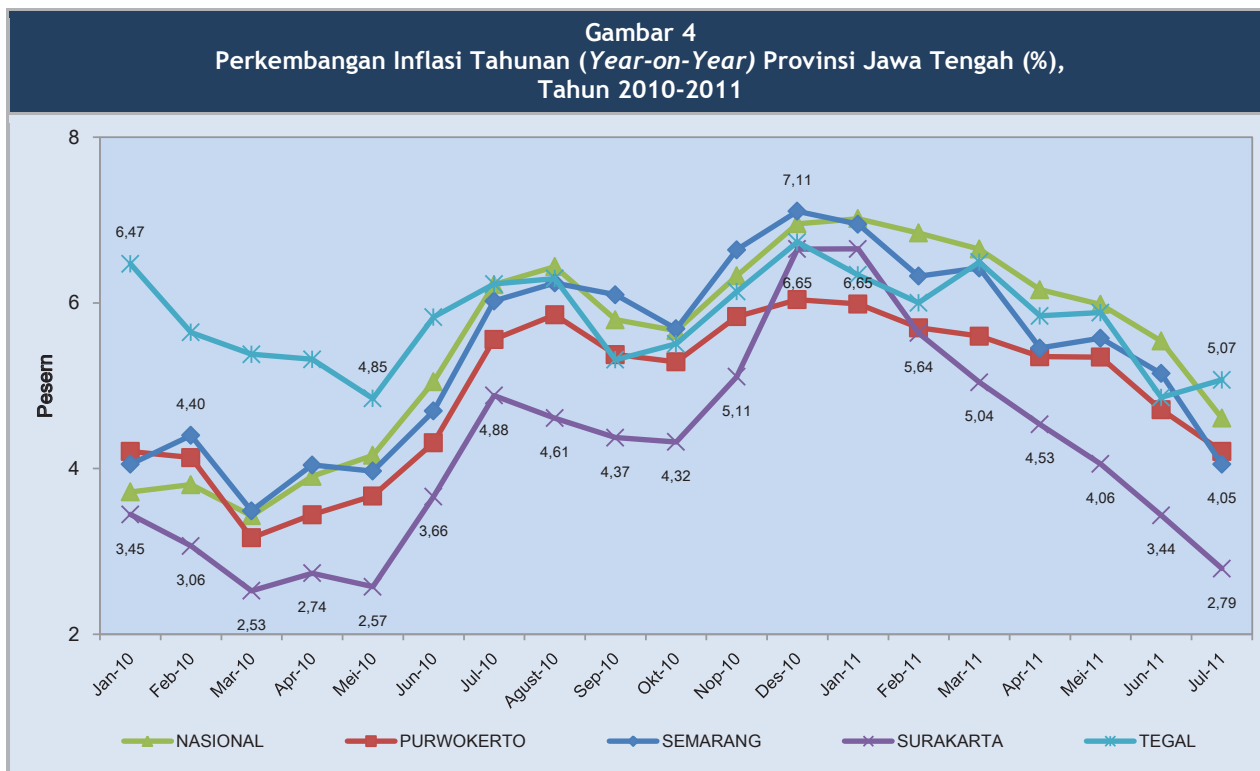
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	19,96	19,30	18,69	36,84	37,04	35,53
Pertambangan Dan Penggalian	1,10	1,11	1,12	0,86	0,77	0,74
Industri Pengolahan	31,68	32,51	32,83	17,48	16,78	17,81
Listrik, Gas & Air Bersih	0,84	0,84	0,86	0,14	0,18	0,12
Bangunan	5,75	5,83	5,89	6,51	6,49	6,62
Perdagangan, Hotel & Restoran	21,23	21,38	21,42	21,05	21,86	21,43
Pengangkutan & Komunikasi	5,16	5,20	5,24	4,63	4,30	4,20
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,71	3,79	3,76	1,09	0,98	1,14
Jasa - Jasa	10,57	10,03	10,18	11,40	11,60	12,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

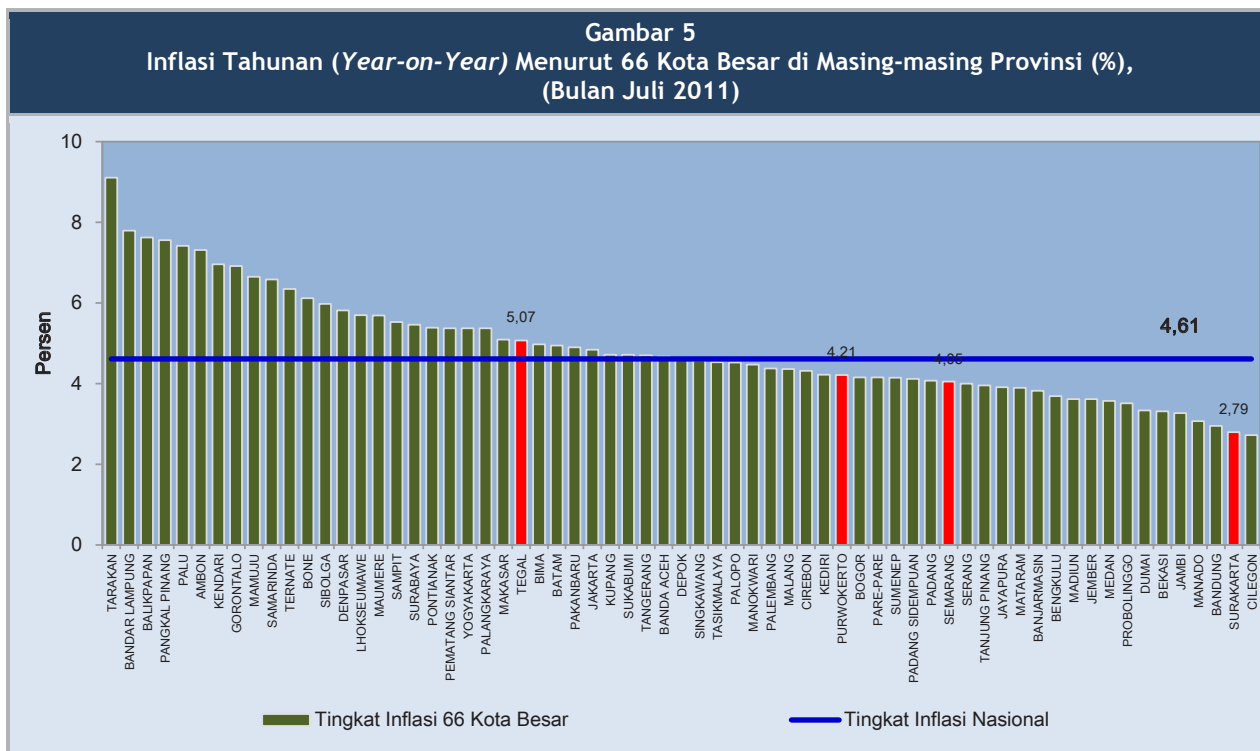


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

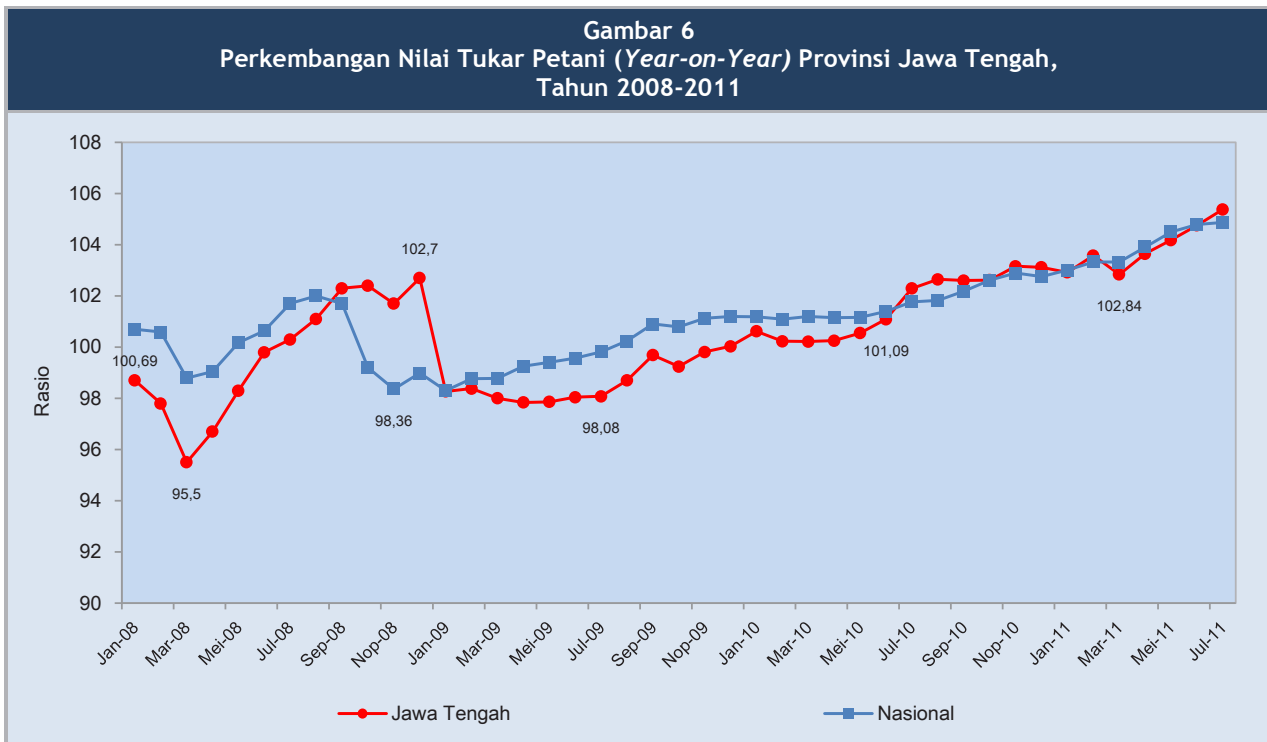


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

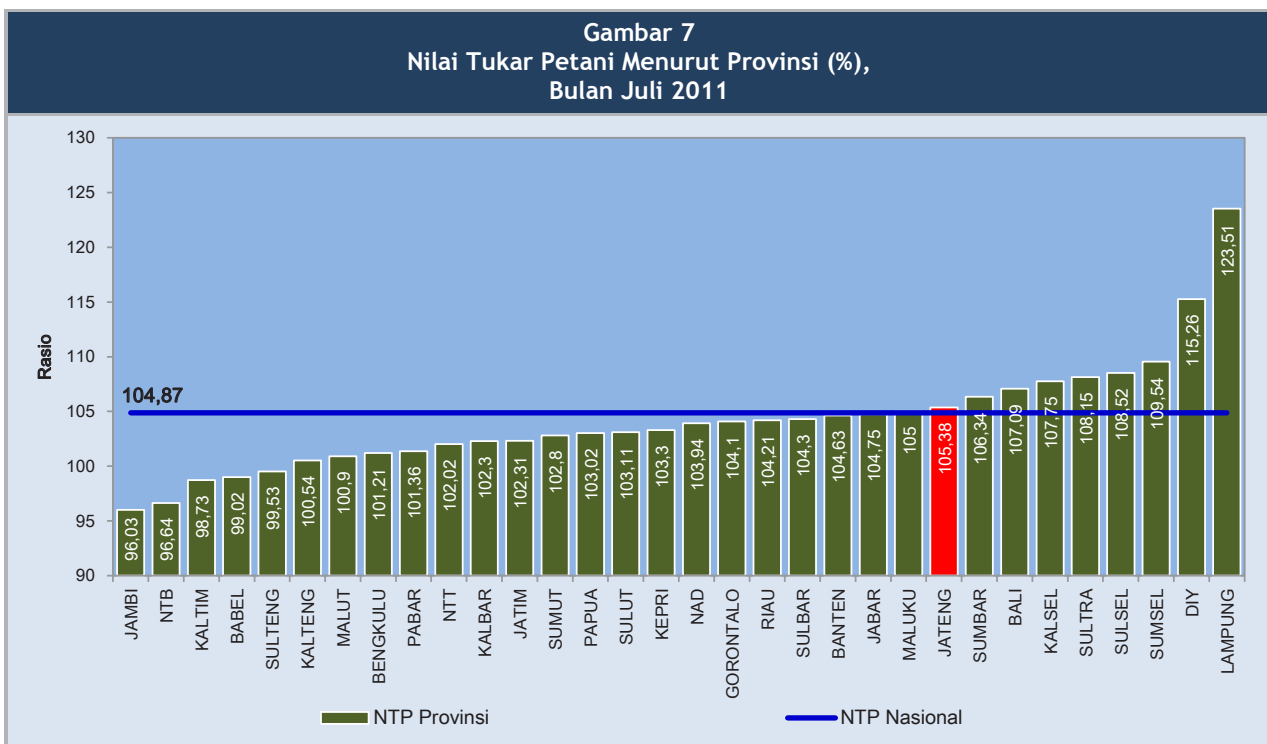


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

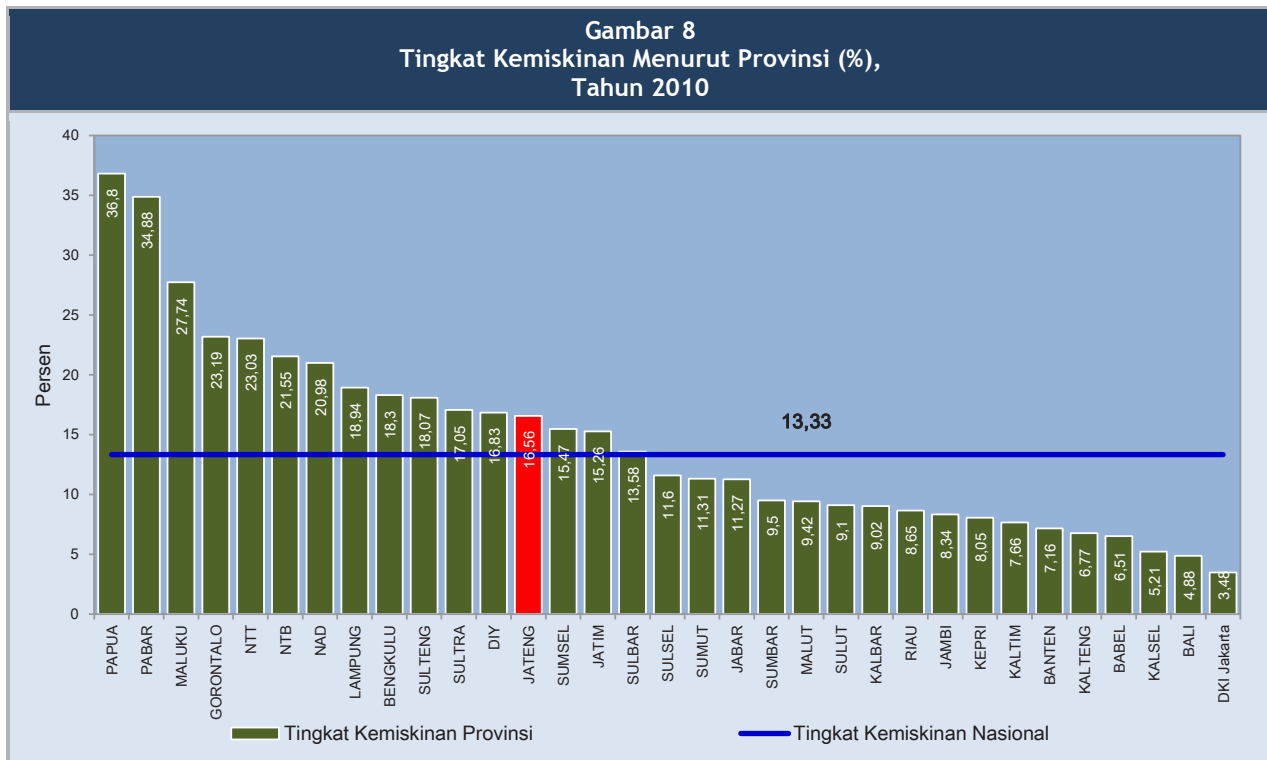


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

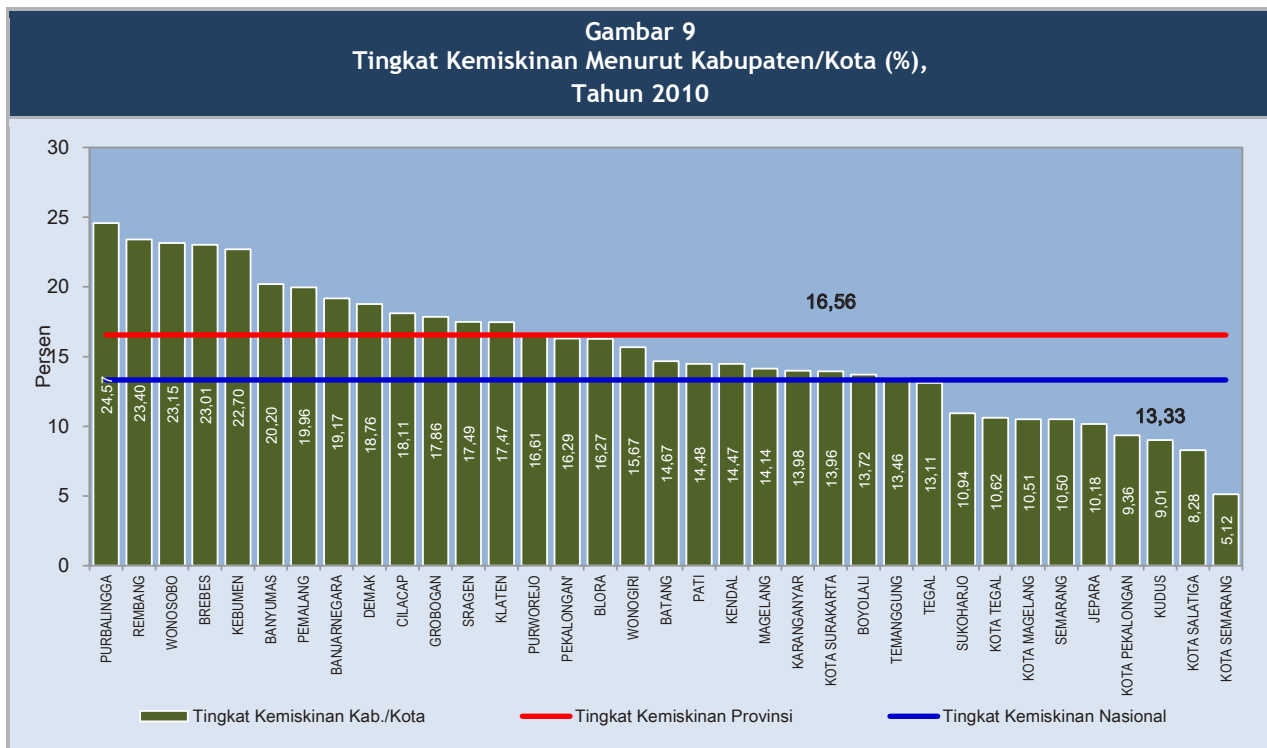


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDIKATOR KEMISKINAN

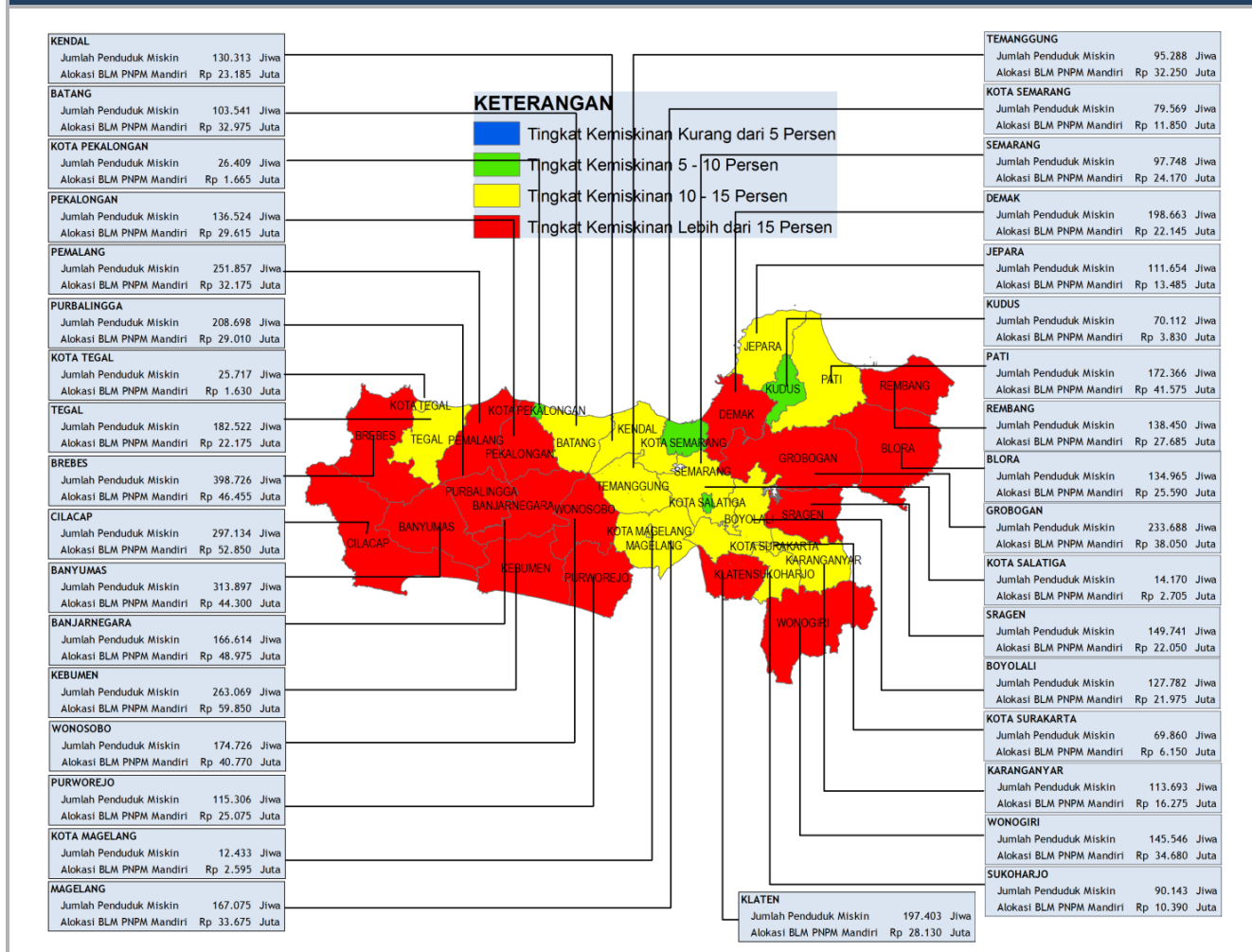
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
CILACAP	191 167	206 714	19,88	18,11	318 751	297 134
BANYUMAS	208 583	225 546	21,52	20,20	319 848	313 897
PURBALINGGA	194 529	210 349	24,97	24,57	205 012	208 698
BANJARNEGARA	160 345	173 385	21,36	19,17	184 023	166 614
KEBUMEN	195 589	211 495	25,73	22,70	309 607	263 069
PURWOREJO	194 292	211 400	17,02	16,61	121 394	115 306
WONOSOBO	187 932	203 216	25,91	23,15	194 023	174 726
MAGELANG	169 158	184 053	15,19	14,14	176 488	167 075
BOYOLALI	195 538	209 495	15,96	13,72	148 240	127 782
KLATEN	241 608	258 854	19,68	17,47	220 180	197 403
SUKOHARJO	211 928	227 055	11,51	10,94	94 449	90 143
WONOGIRI	182 083	195 080	19,08	15,67	184 880	145 546
KARANGANYAR	202 500	216 954	14,73	13,98	118 791	113 693
SRAGEN	192 530	206 273	19,70	17,49	167 299	149 741
GROBOGAN	205 468	223 560	18,68	17,86	247 473	233 688
BLORA	174 951	190 356	17,70	16,27	145 954	134 965
REMBANG	200 216	217 846	25,86	23,40	147 154	138 450
PATI	224 390	244 149	15,92	14,48	184 052	172 366
KUDUS	218 411	237 643	10,80	9,01	84 861	70 112
JEPARA	206 549	224 737	9,60	10,18	104 744	111 654
DEMAK	210 260	228 774	19,70	18,76	202 236	198 663
SEMARANG	189 612	206 308	10,66	10,50	96 724	97 748
TEMANGGUNG	164 343	178 814	15,05	13,46	105 831	95 288
KENDAL	199 020	216 545	16,02	14,47	152 431	130 313
BATANG	155 558	169 256	16,61	14,67	112 169	103 541
PEKALONGAN'	210 168	228 674	17,93	16,29	151 634	136 524
PEMALANG	198 295	216 365	22,17	19,96	303 727	251 857
TEGAL	187 048	204 093	13,98	13,11	195 456	182 522
BREBES	219 119	239 086	24,39	23,01	432 398	398 726
KOTA MAGELANG	237 967	258 921	10,11	10,51	13 654	12 433
KOTA SURAKARTA	286 158	306 584	14,99	13,96	77 971	69 860
KOTA SALATIGA	221 701	241 223	7,82	8,28	14 051	14 170
KOTA SEMARANG	226 271	246 195	4,84	5,12	73 137	79 569
KOTA PEKALONGAN	231 562	251 952	8,56	9,36	23 342	26 409
KOTA TEGAL	248 173	270 788	9,88	10,62	23 428	25 717
JAWA TENGAH	191 985	201 138	11,96	11,27	5655 412	5215 403
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

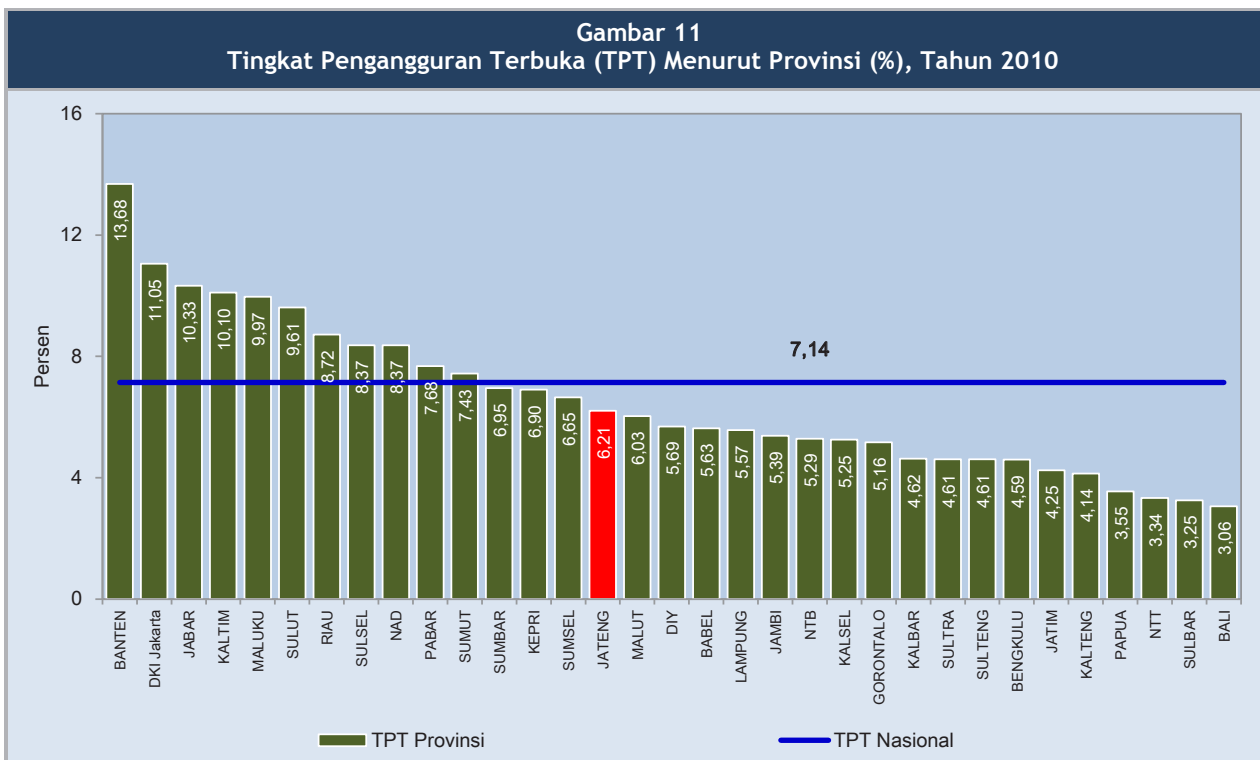
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

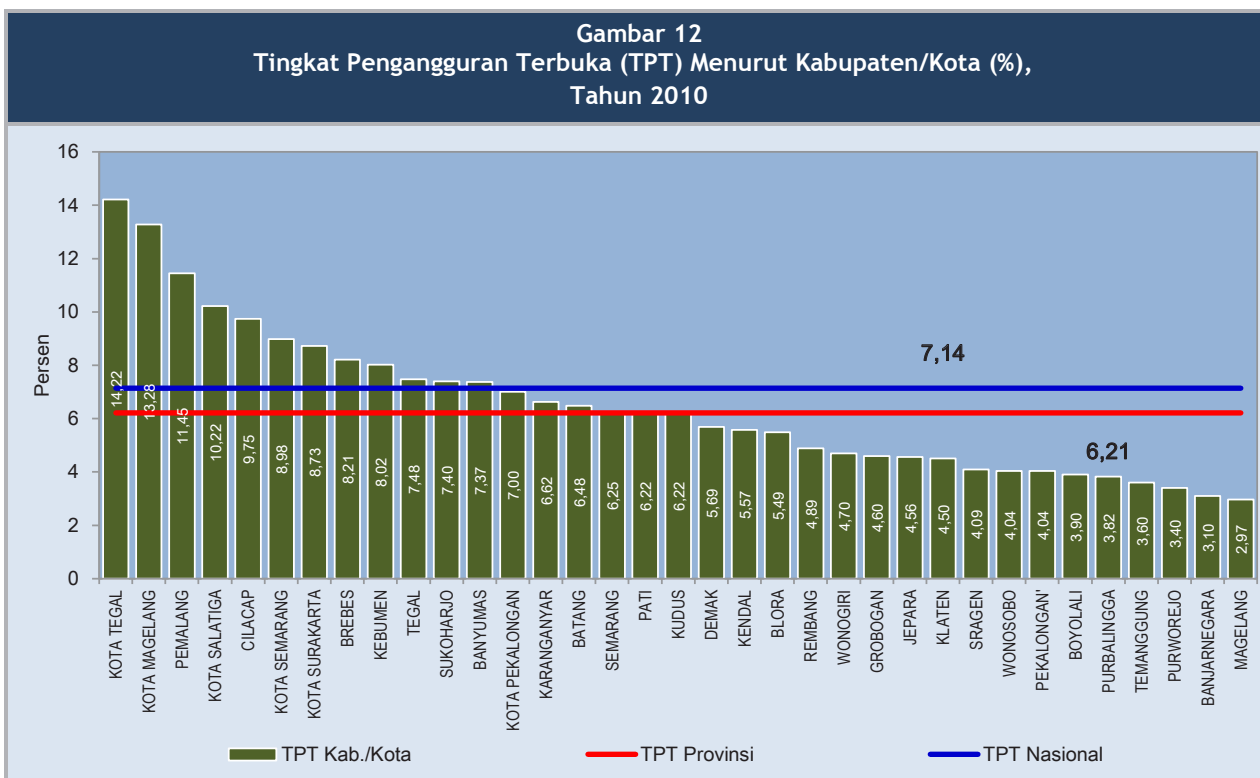


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

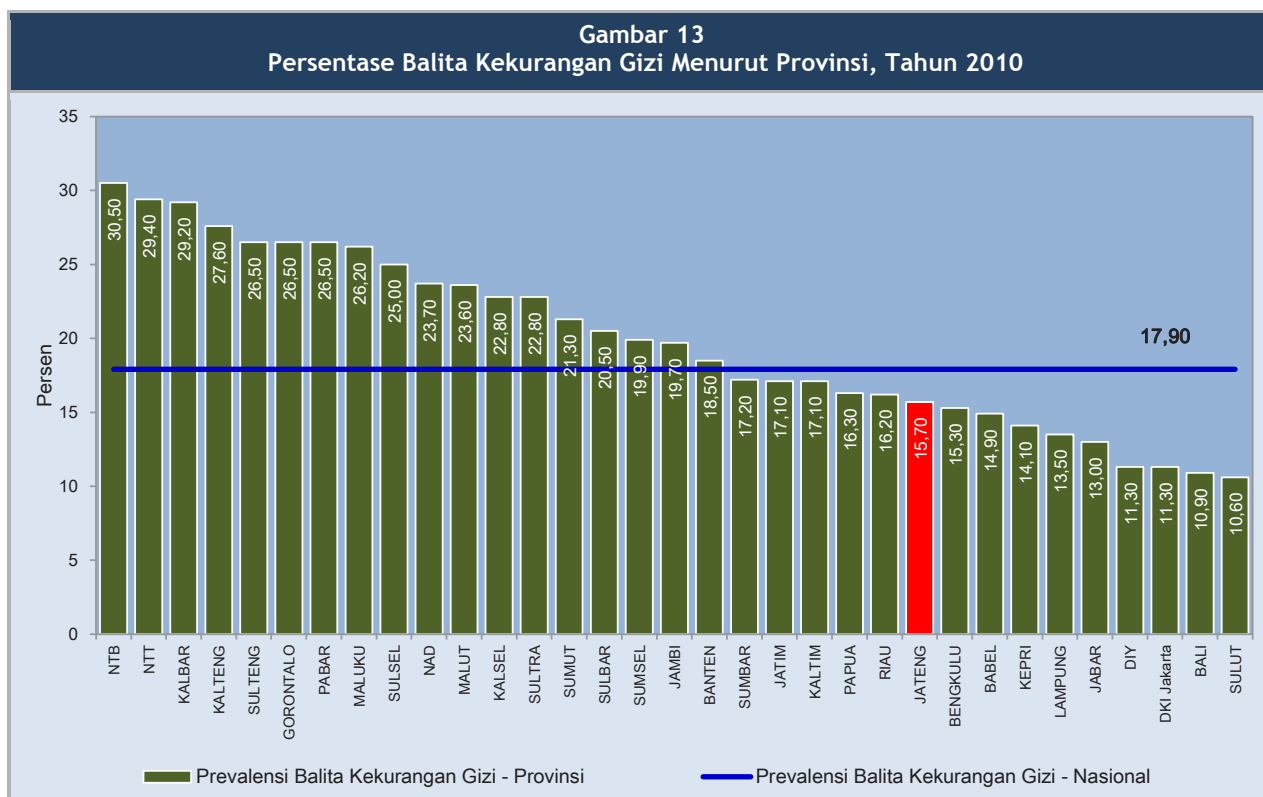
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
CILACAP	64,28	64,79	3,80	3,29	35,72	32,95	67,22	66,42
BANYUMAS	64,61	69,55	2,44	3,44	23,48	23,51	60,57	59,40
PURBALINGGA	69,43	71,23	4,68	2,49	30,42	28,79	65,05	67,34
BANJARNEGARA	71,75	73,69	2,83	2,43	32,10	35,49	77,90	77,04
KEBUMEN	68,86	70,21	5,59	4,49	37,56	31,89	74,98	74,52
PURWOREJO	66,08	68,14	4,44	4,45	33,75	32,63	71,86	67,51
WONOSOBO	72,24	73,09	6,97	6,61	34,51	37,99	75,96	75,32
MAGELANG	72,86	74,08	4,98	3,35	34,34	32,30	72,81	68,71
BOYOLALI	74,65	76,04	6,13	3,57	32,83	30,63	65,59	65,02
KLATEN	68,27	66,71	2,53	2,91	25,31	22,15	55,79	55,18
SUKOHARJO	69,15	69,13	2,37	3,40	19,84	21,45	53,70	46,89
WONOGIRI	73,26	71,99	9,86	3,83	47,02	47,86	81,78	80,09
KARANGANYAR	70,23	75,03	2,82	3,16	28,20	27,32	58,77	57,52
SRAGEN	72,29	74,89	4,49	5,92	32,30	33,66	69,46	62,08
GROBOGAN	76,07	74,91	9,01	7,43	43,10	47,83	78,86	79,28
BLORA	75,94	74,56	3,06	4,75	39,59	45,83	78,41	73,90
REMBANG	72,56	71,37	7,06	6,69	45,45	40,59	78,99	75,68
PATI	69,33	68,88	5,82	5,18	37,72	30,87	66,72	67,31
KUDUS	72,29	72,03	1,94	2,03	21,20	20,43	42,42	42,74
JEPARA	69,42	70,17	2,32	2,90	24,91	27,95	47,46	49,13
DEMAK	69,19	68,20	3,26	3,15	27,62	28,57	68,55	68,05
SEMARANG	73,61	76,48	3,32	3,10	23,86	22,40	56,31	56,47
TEMANGGUNG	73,39	77,57	3,03	2,42	28,07	25,47	68,91	67,60
KENDAL	71,56	71,03	5,76	4,57	38,16	32,48	65,56	63,99
BATANG	68,99	72,66	1,53	2,24	23,68	27,00	66,17	66,95
PEKALONGAN'	70,49	70,42	2,03	1,79	22,13	22,57	45,46	48,02
PEMALANG	64,70	65,10	3,20	1,66	26,13	25,84	64,31	67,87
TEGAL	62,20	64,43	4,04	2,30	29,15	29,27	68,69	64,81
BREBES	66,04	71,27	7,96	6,88	37,74	43,36	77,11	76,22
KOTA MAGELANG	62,50	68,46	2,71	1,40	12,99	15,07	41,88	35,32
KOTA SURAKARTA	65,02	66,81	2,08	1,34	12,83	10,43	35,17	33,65
KOTA SALATIGA	64,40	67,64	2,96	1,87	16,67	15,27	40,30	34,66
KOTA SEMARANG	66,24	67,00	1,89	0,97	11,46	9,50	30,35	27,49
KOTA PEKALONGAN	68,93	72,30	0,67	0,64	12,19	9,26	36,44	33,86
KOTA TEGAL	64,57	70,35	3,54	3,06	20,64	15,22	48,24	43,08
JAWA TENGAH	69,27	70,60	4,35	3,66	30,37	29,94	64,05	62,73
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

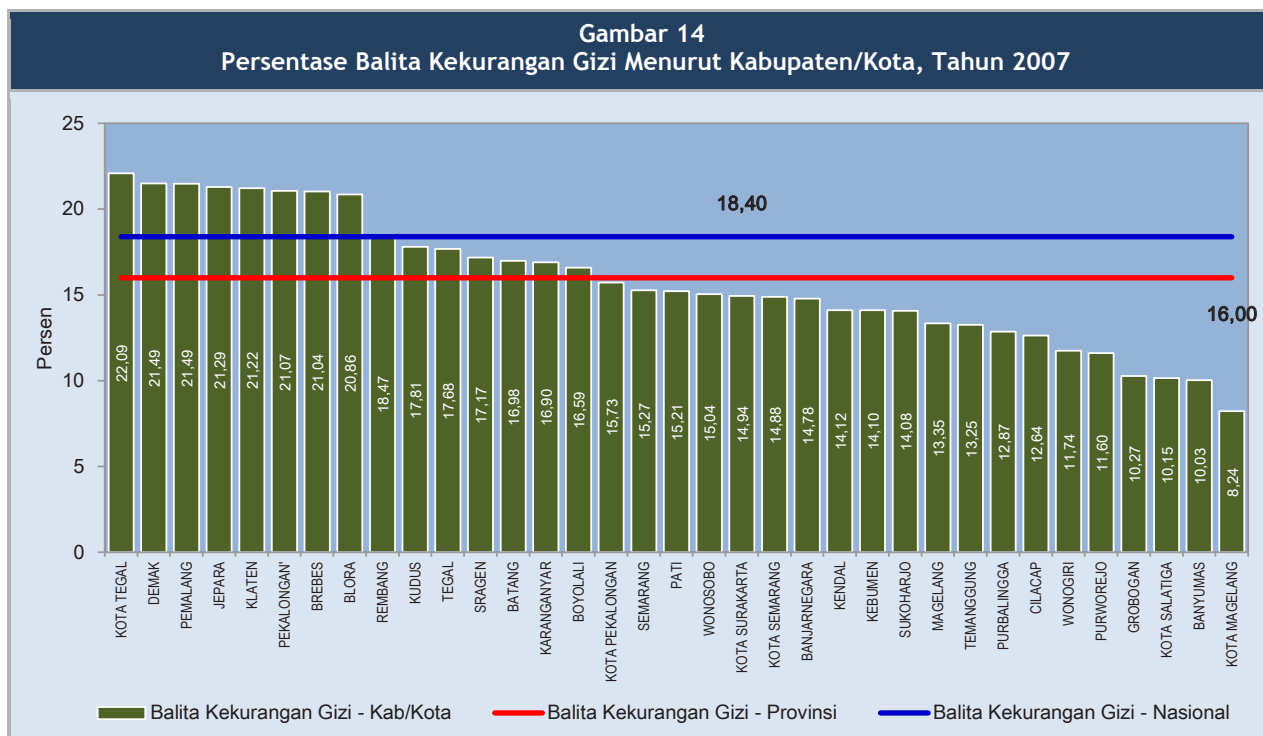
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

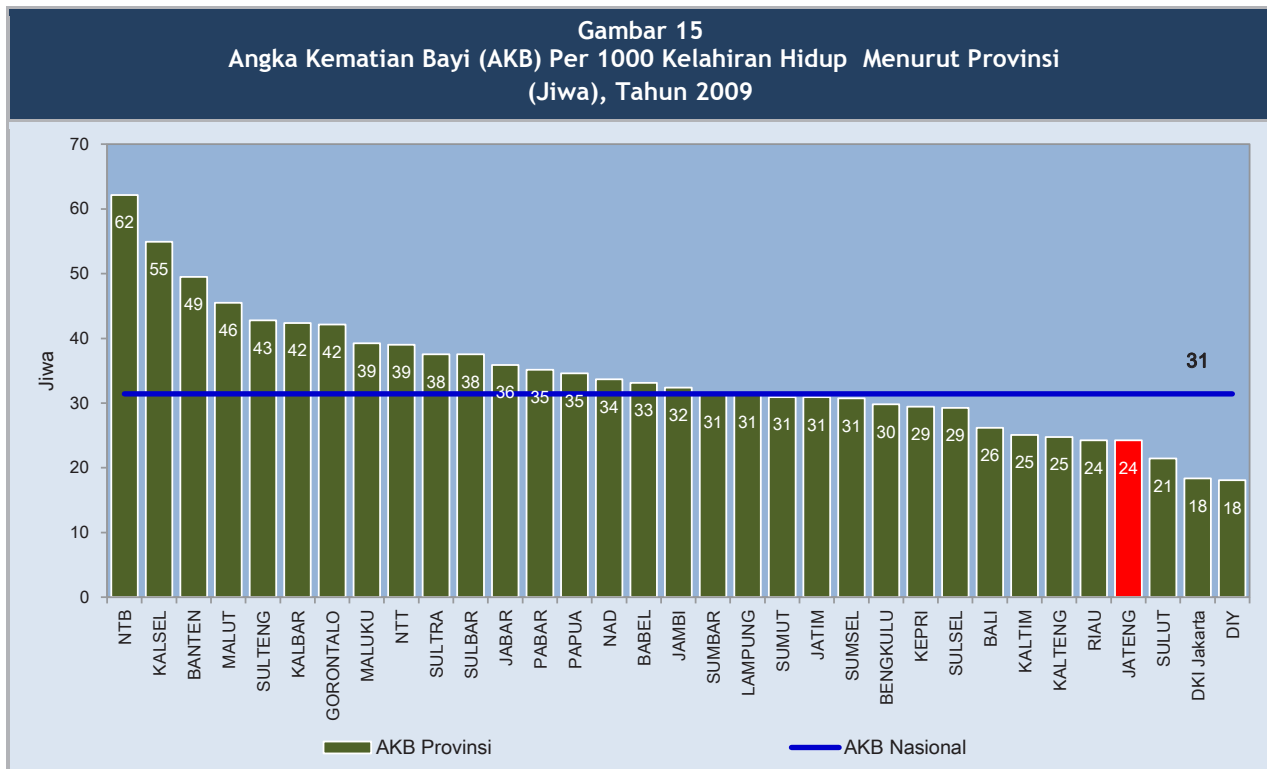


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

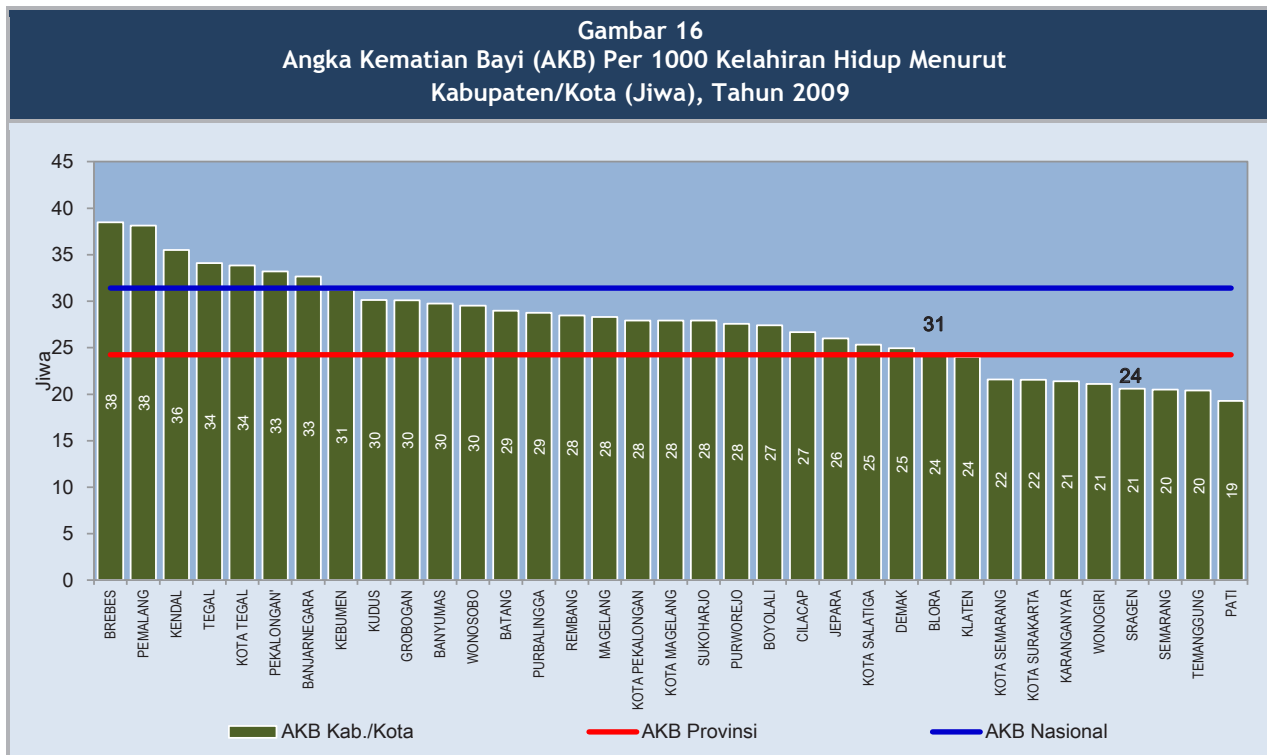


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

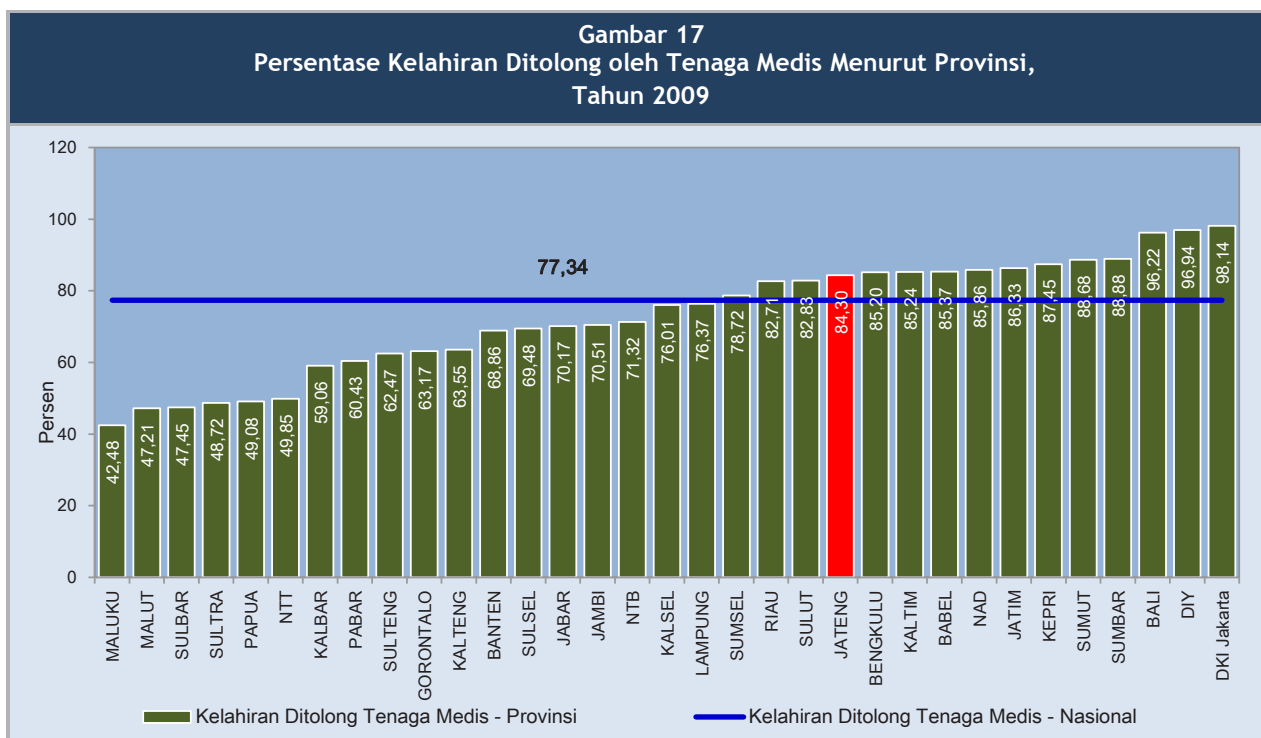


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

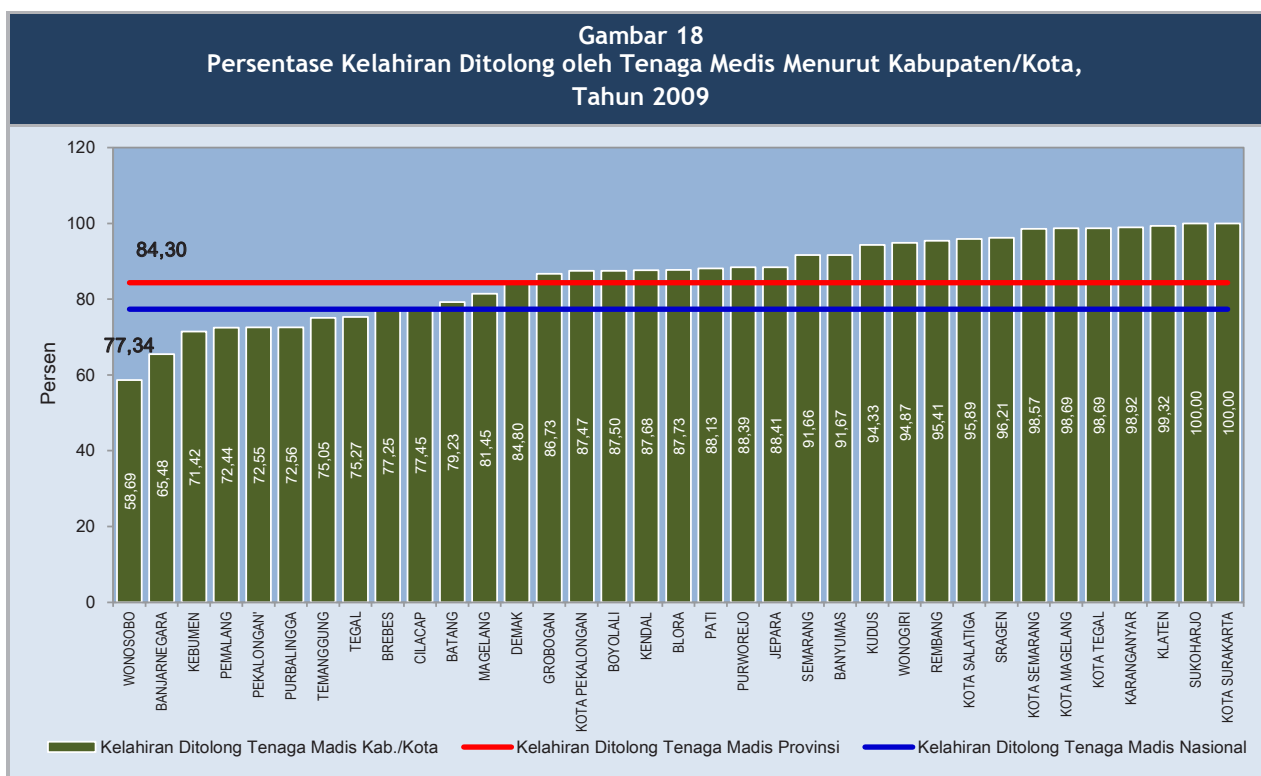


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

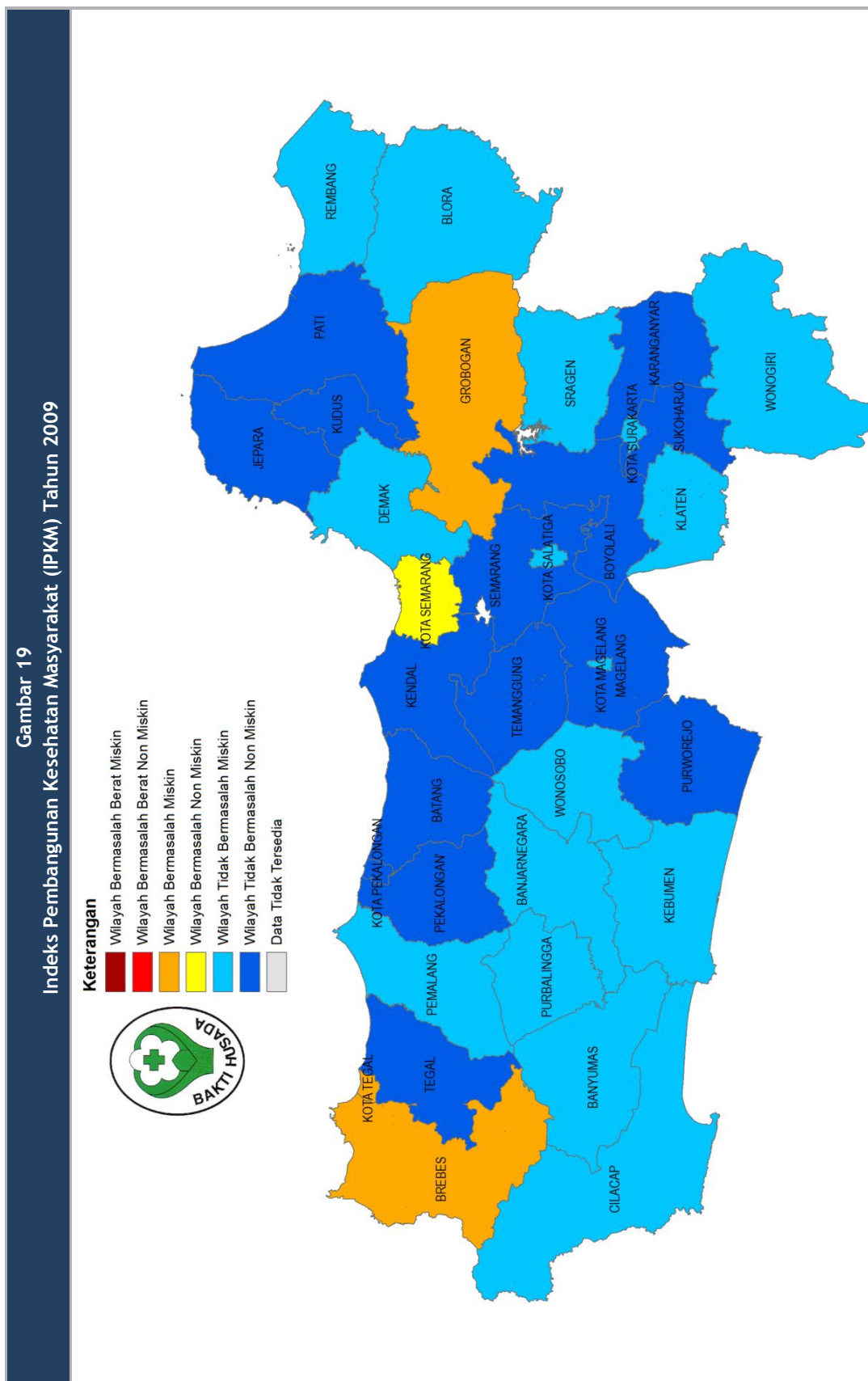
BIDANG KESEHATAN

Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
CILACAP	25,41	13,92	5,38	72,46
BANYUMAS	31,35	17,26	4,75	64,38
PURBALINGGA	42,38	24,05	4,81	57,95
BANJARNEGARA	27,51	15,80	5,92	53,16
KEBUMEN	28,85	14,59	5,71	64,90
PURWOREJO	32,88	12,71	6,98	53,61
WONOSOBO	35,47	15,08	6,57	64,35
MAGELANG	27,12	12,69	6,74	61,73
BOYOLALI	35,36	17,28	5,52	62,20
KLATEN	29,68	12,96	5,87	59,36
SUKOHARJO	24,08	12,30	5,21	67,31
WONOGIRI	28,49	12,90	6,41	50,60
KARANGANYAR	38,08	10,23	7,54	58,16
SRAGEN	30,50	16,18	5,48	54,45
GROBOGAN	43,19	22,39	4,56	61,53
BLORA	35,18	22,71	4,77	69,04
REMBANG	36,38	20,09	5,47	61,77
PATI	24,84	14,34	5,90	56,17
KUDUS	26,10	14,23	4,83	62,04
JEPARA	31,55	24,08	4,78	56,48
DEMAK	23,00	14,34	4,36	55,71
SEMARANG	33,98	14,33	6,12	60,65
TEMANGGUNG	23,40	9,79	6,59	64,62
KENDAL	38,67	16,19	5,06	65,40
BATANG	20,70	11,90	4,99	63,21
PEKALONGAN'	30,09	21,93	5,08	62,20
PEMALANG	29,88	14,45	5,19	67,79
TEGAL	35,84	20,70	4,87	66,96
BREBES	49,20	21,29	5,24	77,58
KOTA MAGELANG	25,77	15,69	7,03	70,54
KOTA SURAKARTA	33,20	8,95	5,97	60,57
KOTA SALATIGA	41,81	18,70	5,54	61,73
KOTA SEMARANG	39,70	20,53	5,03	74,06
KOTA PEKALONGAN	26,66	13,03	4,61	63,31
KOTA TEGAL	32,85	18,01	5,17	61,47
JAWA TENGAH	32,50	16,54	5,35	63,84
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

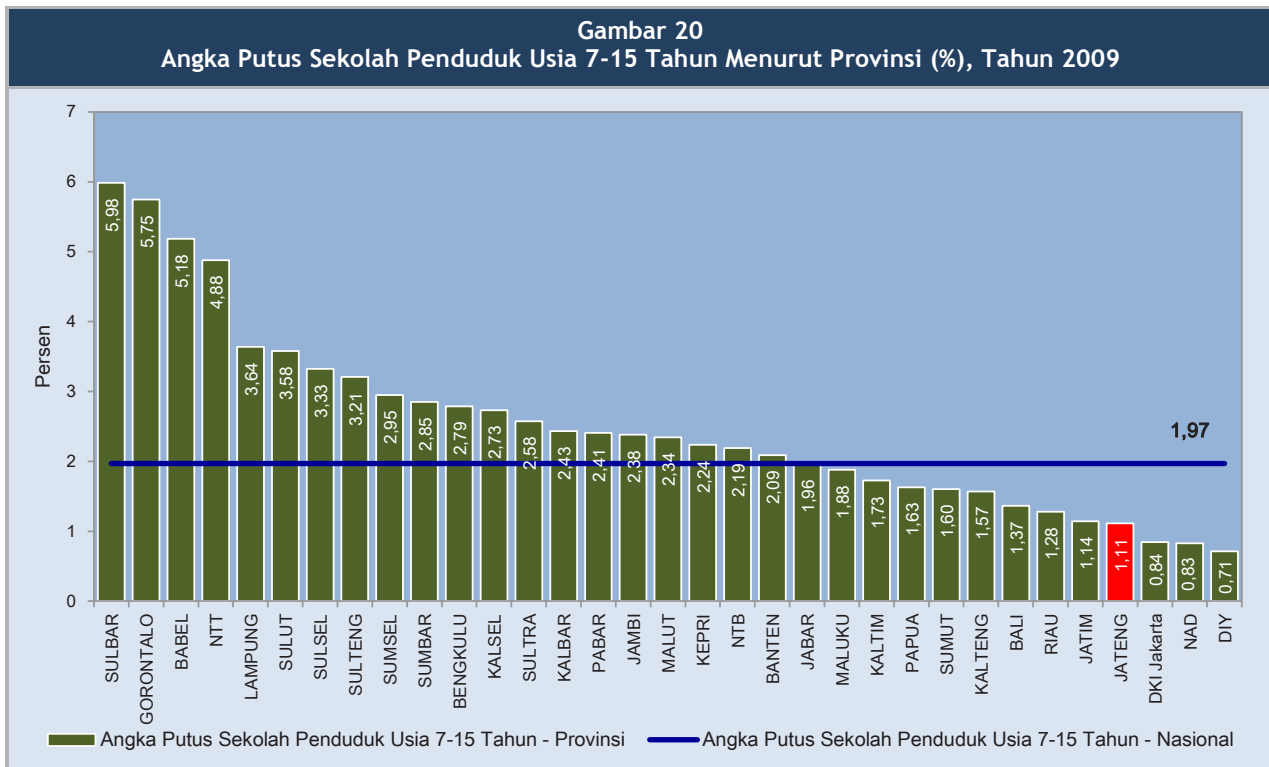
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
CILACAP	KaE	80	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
BANYUMAS	KaE	83	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
PURBALINGGA	KaE	187	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
BANJARNEGARA	KaE	242	0,49	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
KEBUMEN	KaE	136	0,56	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
PURWOREJO	KaF	152	0,55	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
WONOSOBO	KaE	127	0,57	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
MAGELANG	KaF	75	0,61	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BOYOLALI	KaF	85	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KLATEN	KaE	118	0,58	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
SUKOHARJO	KaF	6	0,69	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
WONOGIRI	KaE	29	0,65	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
KARANGANYAR	KaF	69	0,62	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
SRAGEN	KaE	117	0,58	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
GROBOGAN	KaC	278	0,47	Kabupaten Bermasalah Miskin
BLORA	KaE	188	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
REMBANG	KaE	168	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
PATI	KaF	94	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KUDUS	KaF	92	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
JEPARA	KaF	162	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
DEMAK	KaE	186	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
SEMARANG	KaF	58	0,62	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
TEMANGGUNG	KaF	104	0,59	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KENDAL	KaF	157	0,55	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BATANG	KaF	175	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
PEKALONGAN	KaF	145	0,55	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
PEMALANG	KaE	241	0,49	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
TEGAL	KaF	126	0,57	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BREBES	KaC	292	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
KOTA MAGELANG	KoE	1	0,71	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA SURAKARTA	KoE	42	0,63	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA SALATIGA	KoE	3	0,70	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA SEMARANG	KoD	99	0,59	Kota Bermasalah Non Miskin
KOTA PEKALONGAN	KoF	45	0,63	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA TEGAL	KoC	134	0,56	Kota Bermasalah Miskin

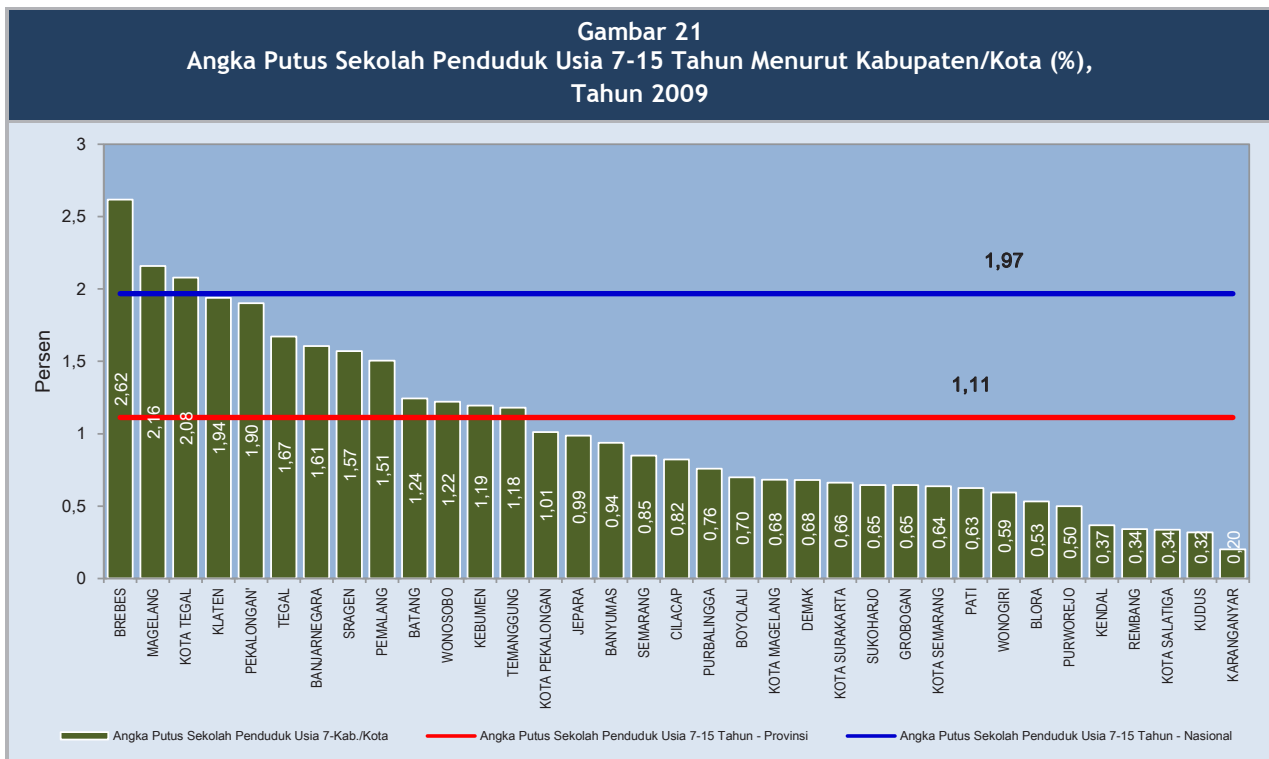
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Risesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

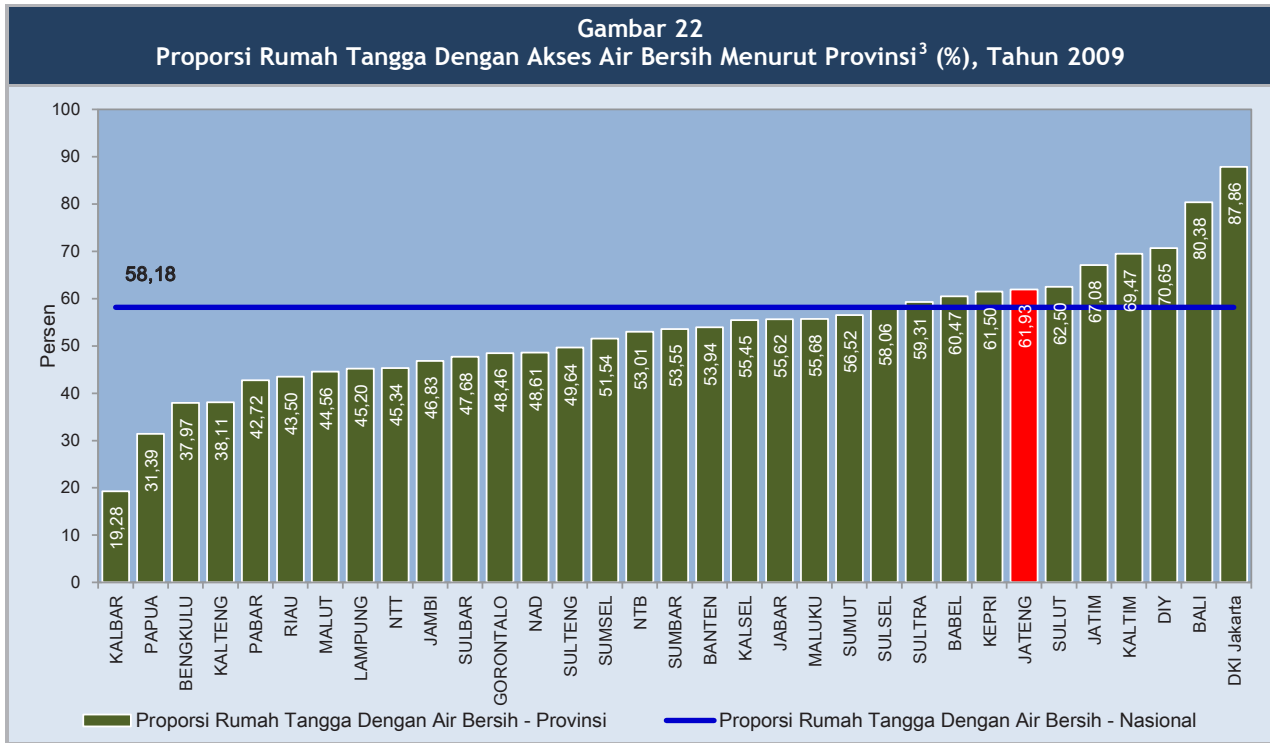
BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

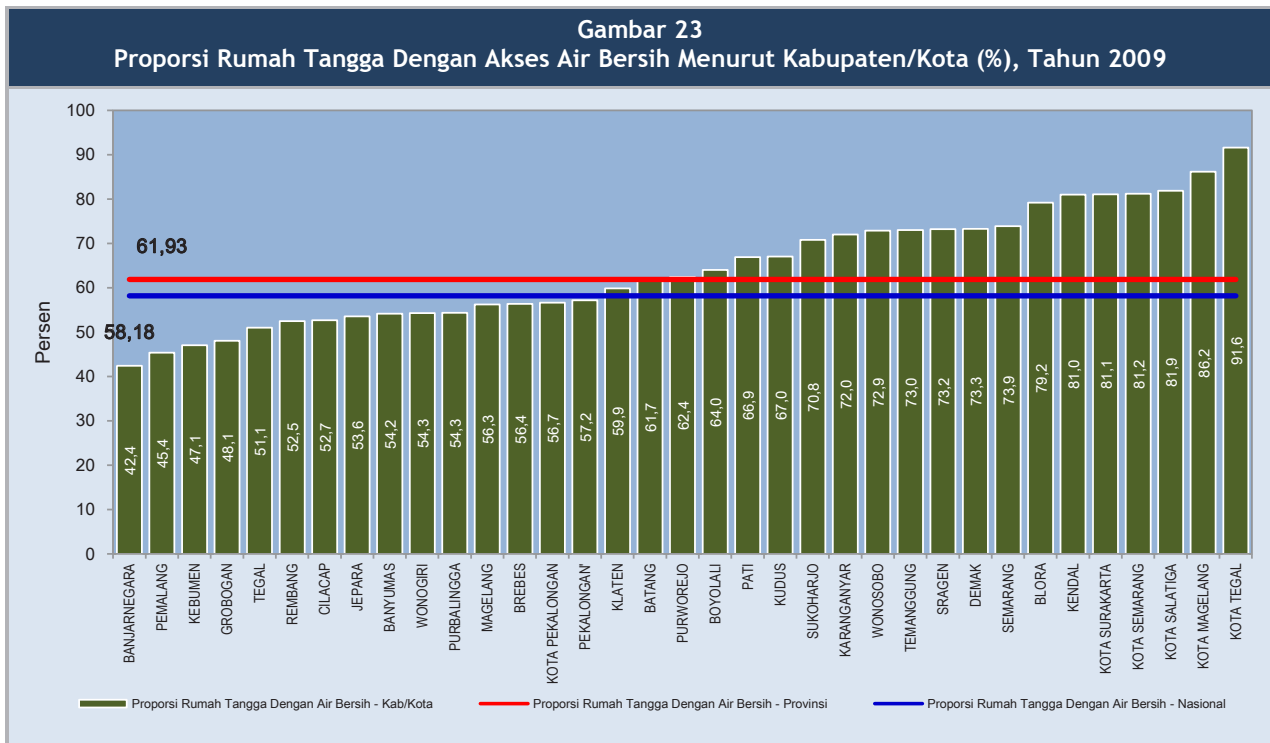
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
CILACAP	112,84	98,03	78,79	71,03	56,02	39,66
BANYUMAS	118,09	96,97	79,71	72,04	65,51	46,37
PURBALINGGA	116,85	98,20	80,48	72,35	46,45	38,02
BANJARNEGARA	115,56	97,53	63,24	58,01	40,68	28,80
KEBUMEN	116,05	96,89	81,22	69,20	58,97	45,09
PURWOREJO	118,55	97,24	91,37	81,91	68,29	51,11
WONOSOBO	113,23	95,67	64,88	57,31	47,23	30,95
MAGELANG	113,25	96,89	76,87	72,66	57,33	44,75
BOYOLALI	115,97	97,42	78,76	72,34	73,95	55,86
KLATEN	111,59	97,92	78,74	69,88	88,10	61,54
SUKOHARJO	110,06	98,50	82,51	74,81	98,81	66,25
WONOGIRI	109,50	95,84	88,00	75,02	68,35	48,10
KARANGANYAR	104,73	86,29	95,07	70,13	82,12	56,82
SRAGEN	112,38	97,09	83,91	77,31	78,26	65,03
GROBOGAN	112,34	96,15	80,95	69,32	57,13	39,68
BLORA	111,89	96,73	87,69	75,37	61,76	46,85
REMBANG	108,42	97,26	85,85	69,52	67,22	44,17
PATI	109,87	96,22	84,65	75,17	64,06	47,68
KUDUS	112,51	93,61	83,28	73,10	58,81	44,27
JEPARA	110,32	93,69	80,58	69,89	62,10	41,60
DEMAK	105,75	93,01	92,96	78,14	54,58	43,93
SEMARANG	117,67	97,95	82,80	74,38	55,75	37,95
TEMANGGUNG	112,93	99,01	74,53	68,23	44,72	35,31
KENDAL	113,21	95,78	77,47	68,10	65,61	45,27
BATANG	115,59	94,86	71,93	61,45	44,54	28,29
PEKALONGAN'	108,83	95,19	70,61	63,28	37,61	28,53
PEMALANG	113,55	97,99	74,63	64,67	42,60	32,41
TEGAL	112,64	95,40	74,89	63,98	53,14	38,58
BREBES	110,48	93,28	71,03	61,11	45,45	38,07
KOTA MAGELANG	114,59	99,48	77,56	73,46	85,89	63,51
KOTA SURAKARTA	111,88	98,02	83,00	78,00	87,81	70,04
KOTA SALATIGA	116,69	100,00	83,21	77,31	75,42	54,94
KOTA SEMARANG	101,25	85,75	100,24	71,81	77,72	53,56
KOTA PEKALONGAN	100,12	88,30	89,69	65,86	53,74	38,79
KOTA TEGAL	106,11	88,22	87,03	64,01	78,80	56,06
JAWA TENGAH	112,02	95,63	80,42	69,67	60,85	44,53
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



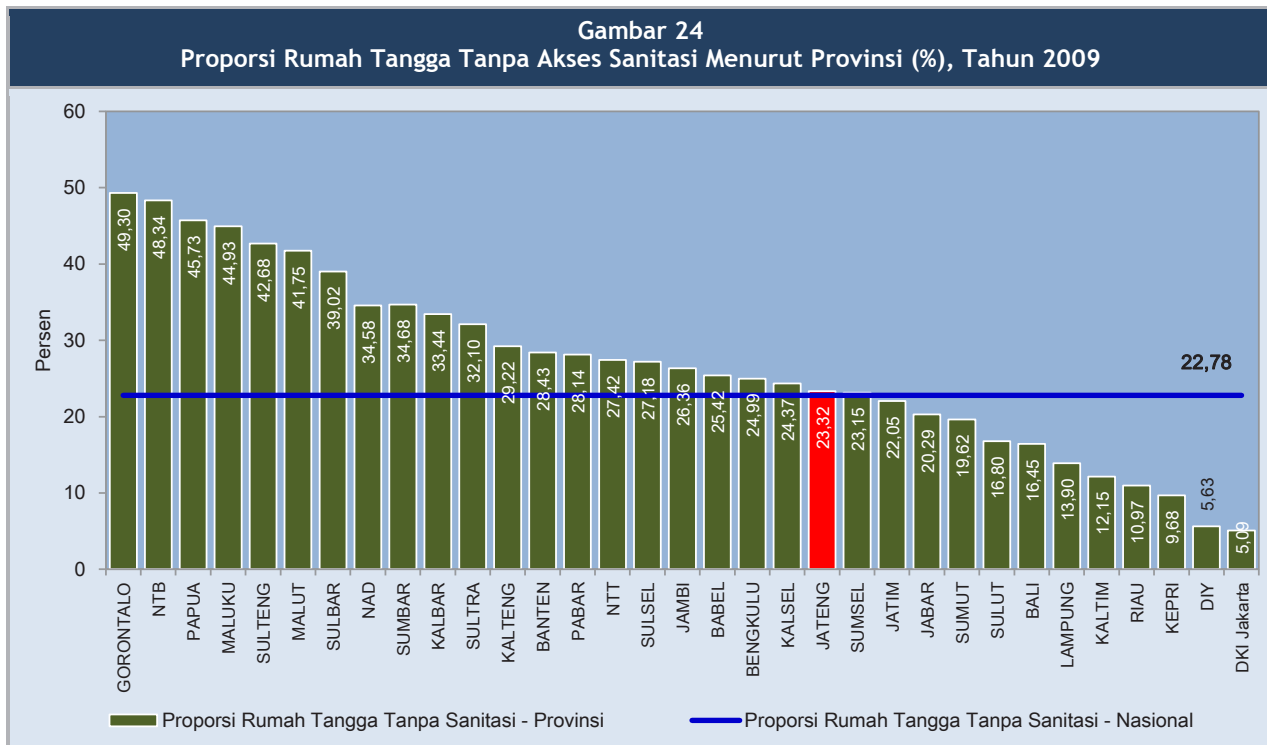
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



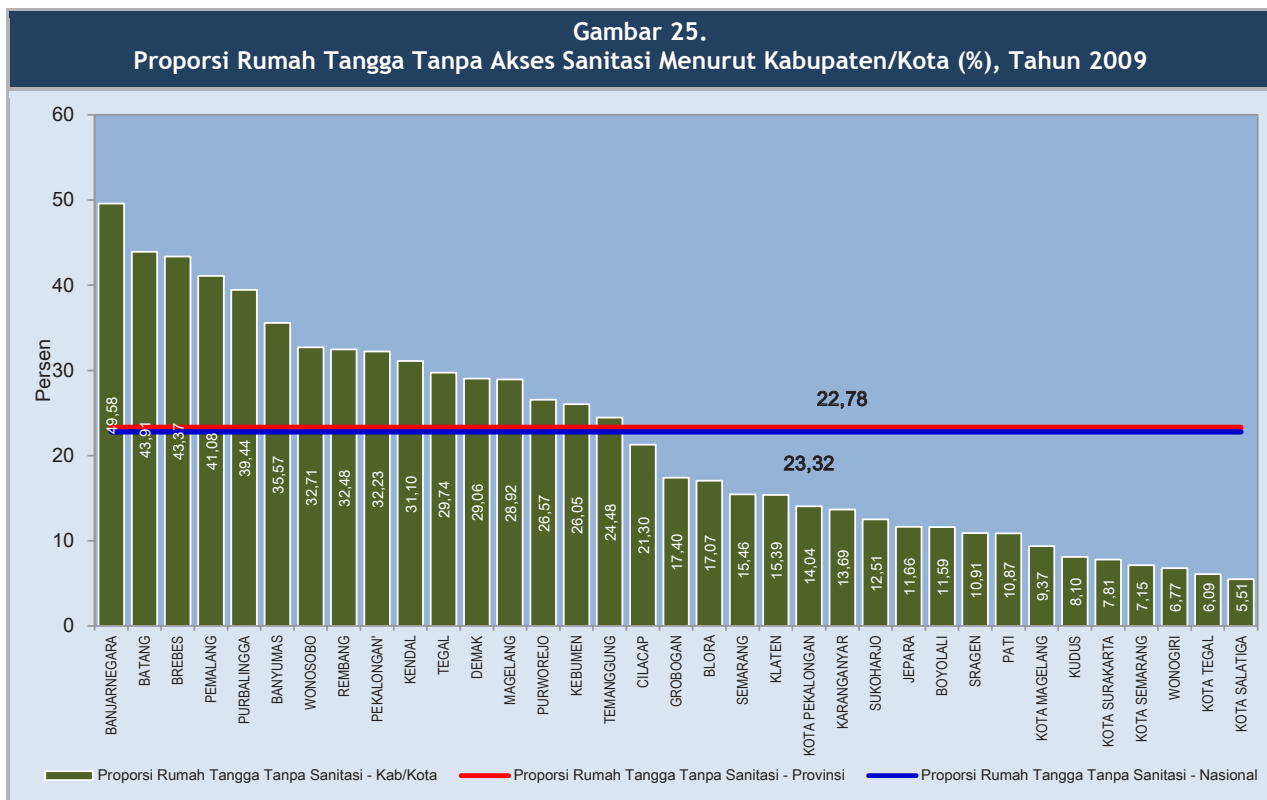
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

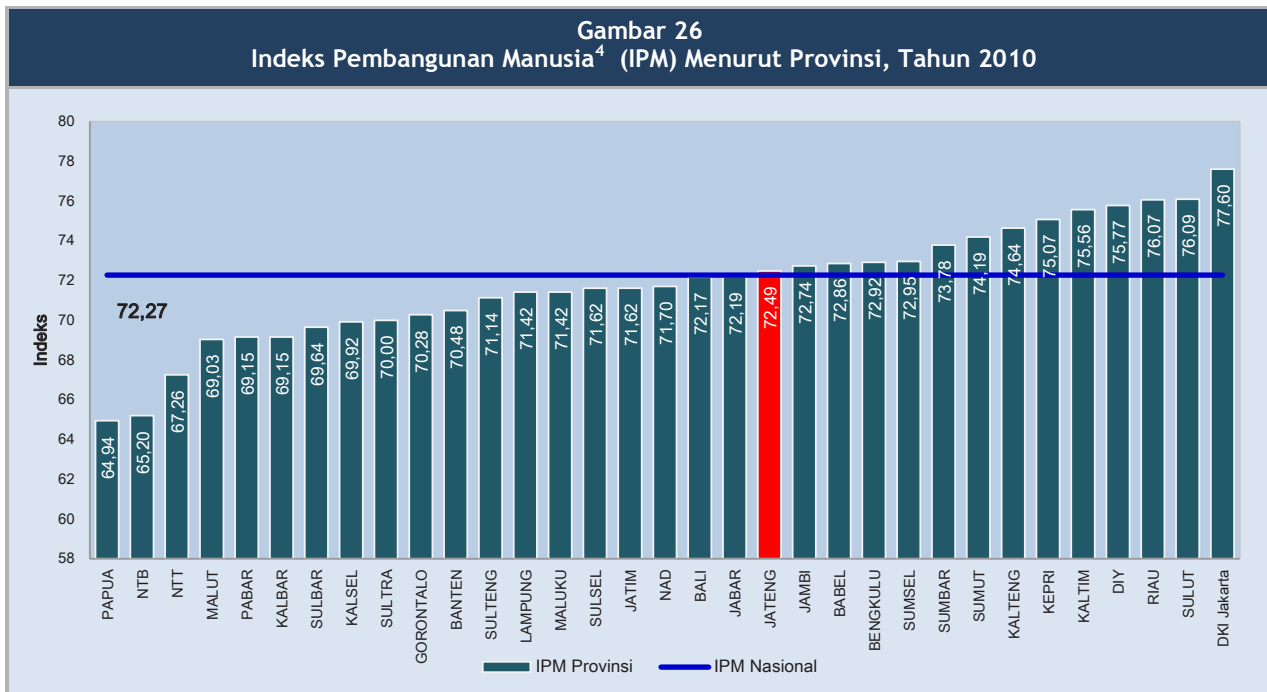


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

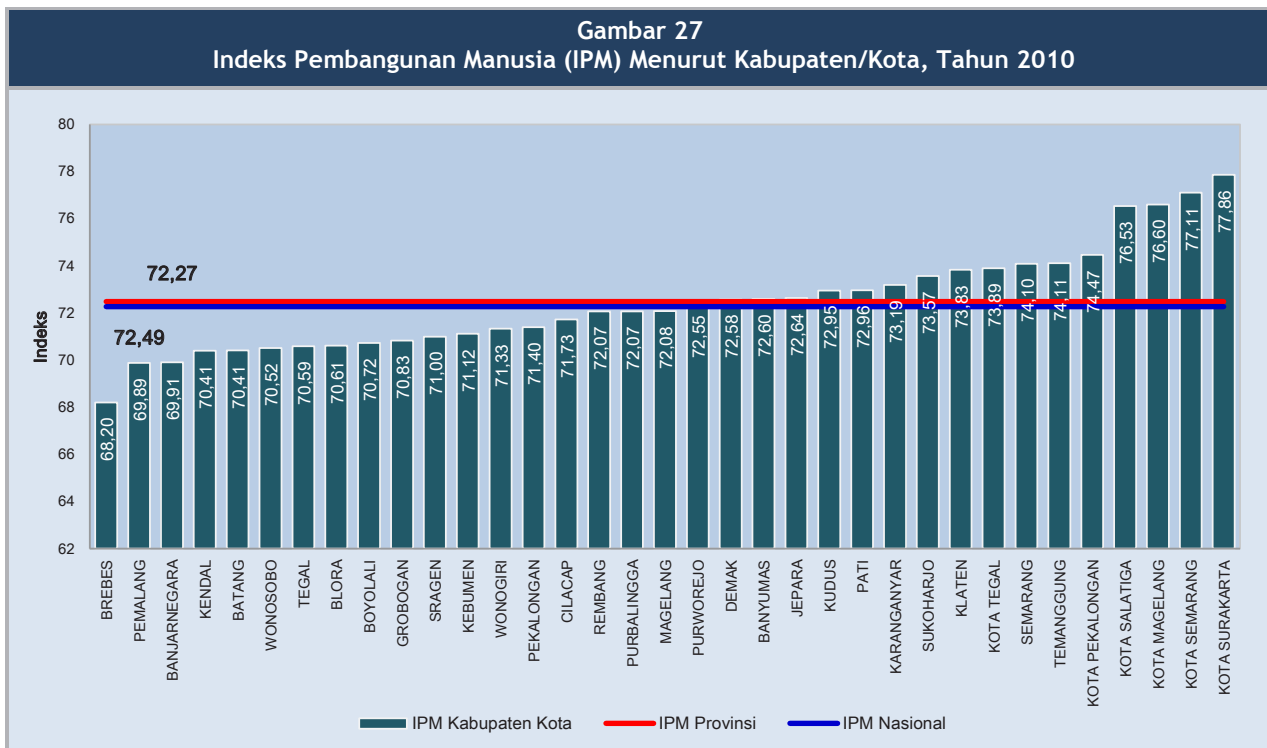


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

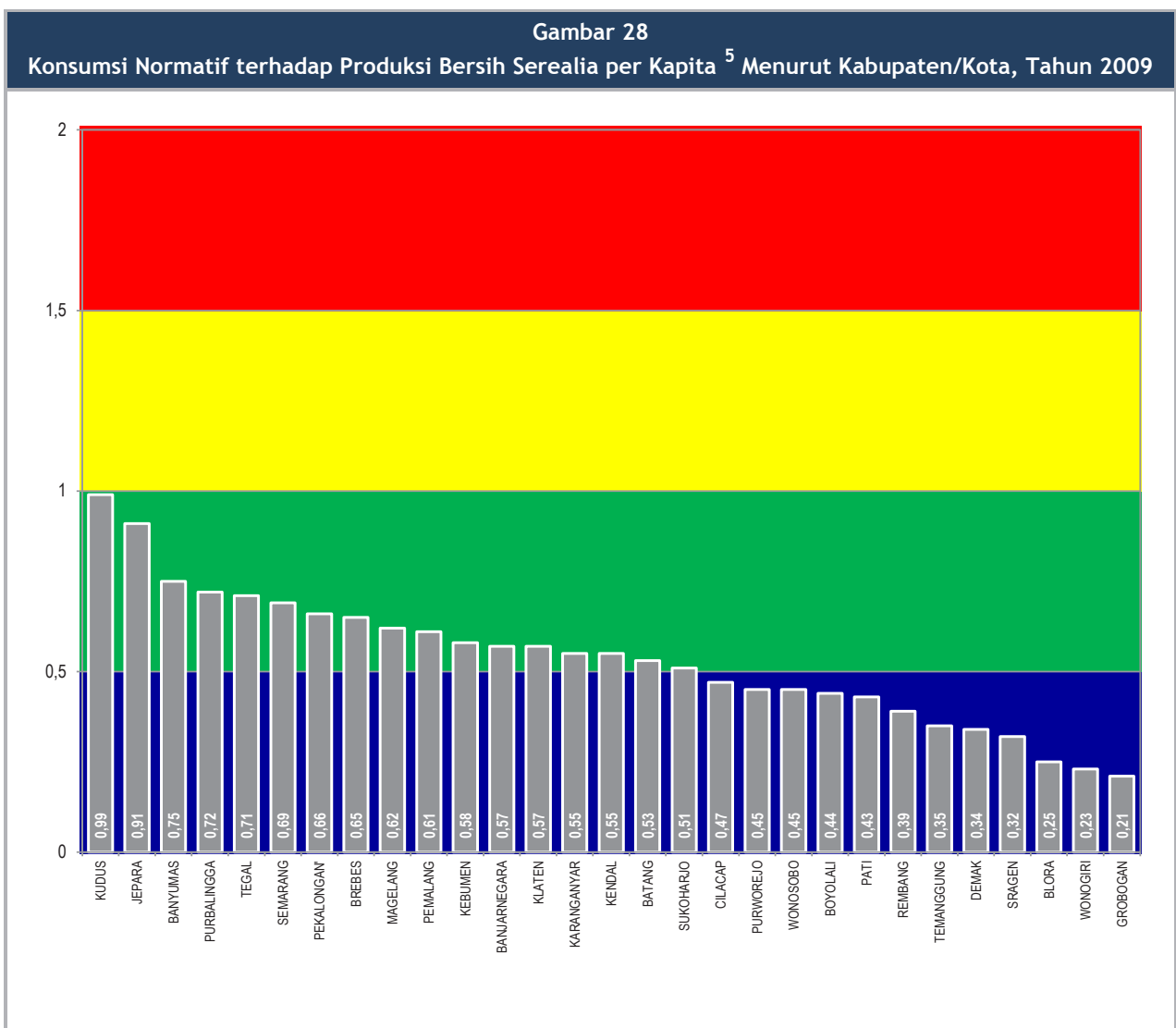
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
CILACAP	70,51	70,82	90,28	90,28	6,72	6,85	633,50	634,50	71,39	71,73
BANYUMAS	69,67	69,72	93,98	93,98	7,72	7,73	630,75	634,52	72,27	72,60
PURBALINGGA	69,94	70,19	93,02	93,48	6,81	7,18	630,44	631,04	71,51	72,07
BANJARNEGARA	68,88	69,04	88,43	88,43	6,20	6,33	632,76	634,04	69,63	69,91
KEBUMEN	69,26	69,32	90,40	90,74	6,84	6,87	632,43	635,81	70,73	71,12
PURWOREJO	70,27	70,52	89,78	91,51	7,70	7,75	633,61	634,97	71,88	72,55
WONOSOBO	69,74	69,98	89,27	90,47	6,27	6,27	629,26	629,76	70,08	70,52
MAGELANG	70,07	70,12	91,35	91,35	7,26	7,26	633,26	636,96	71,76	72,08
BOYOLALI	70,30	70,37	85,97	85,97	7,29	7,37	629,49	632,00	70,44	70,72
KLATEN	71,33	71,50	89,70	89,90	7,93	8,27	643,92	644,21	73,41	73,83
SUKOHARJO	70,17	70,23	90,38	90,69	8,36	8,36	644,60	646,94	73,29	73,57
WONOGIRI	72,21	72,28	82,14	82,18	6,29	6,32	644,24	647,21	71,04	71,33
KARANGANYAR	72,13	72,20	84,96	86,91	7,17	7,39	647,87	647,94	72,55	73,19
SRAGEN	72,37	72,56	82,26	84,36	6,88	6,99	627,15	628,04	70,27	71,00
GROBOGAN	69,57	69,73	90,36	90,36	6,76	6,76	629,42	631,25	70,60	70,83
BLORA	71,20	71,34	83,19	83,19	6,25	6,25	637,29	642,36	70,14	70,61
REMBANG	70,02	70,13	89,43	91,17	6,85	6,85	640,28	641,28	71,55	72,07
PATI	72,77	72,83	86,38	86,42	6,95	6,95	643,48	646,15	72,72	72,96
KUDUS	69,57	69,62	92,48	93,71	8,11	8,11	635,90	636,90	72,57	72,95
JEPARA	70,71	70,85	93,09	93,09	7,40	7,40	631,04	632,48	72,45	72,64
DEMAK	71,04	71,24	90,95	91,36	7,26	7,59	631,72	632,22	72,10	72,58
SEMARANG	72,40	72,47	93,62	93,62	7,40	7,75	633,14	634,97	73,66	74,10
TEMANGGUNG	72,43	72,54	95,94	95,94	6,86	7,01	633,87	635,01	73,85	74,11
KENDAL	68,10	68,44	88,96	89,15	6,90	6,91	635,70	637,09	70,07	70,41
BATANG	69,88	70,11	87,74	88,09	6,34	6,71	628,82	630,11	69,84	70,41
PEKALONGAN	68,73	69,01	90,60	92,05	6,66	6,66	638,79	639,95	70,83	71,40
PEMALANG	67,46	67,68	87,75	90,76	6,49	6,49	634,26	635,26	69,02	69,89
TEGAL	68,49	68,79	89,21	89,26	6,42	6,56	637,09	639,95	70,08	70,59
BREBES	67,37	67,67	85,21	86,14	5,62	5,70	633,23	634,36	67,69	68,20
KOTA MAGELANG	70,17	70,22	97,25	97,25	10,10	10,21	648,06	649,52	76,37	76,60
KOTA SURAKARTA	72,07	72,16	96,67	96,68	10,32	10,32	648,23	652,43	77,49	77,86
KOTA SALATIGA	70,92	71,03	96,50	96,50	9,75	9,94	644,65	647,54	76,11	76,53
KOTA SEMARANG	72,07	72,13	96,44	96,44	9,98	9,98	644,63	646,94	76,90	77,11
KOTA PEKALONGAN	70,16	70,32	95,48	95,68	8,66	8,66	636,28	640,55	74,01	74,47
KOTA TEGAL	68,56	68,74	94,88	94,88	8,25	8,25	648,66	650,72	73,63	73,89
JAWA TENGAH	71,25	71,40	89,46	89,95	7,07	7,24	636,39	637,27	72,10	72,49
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



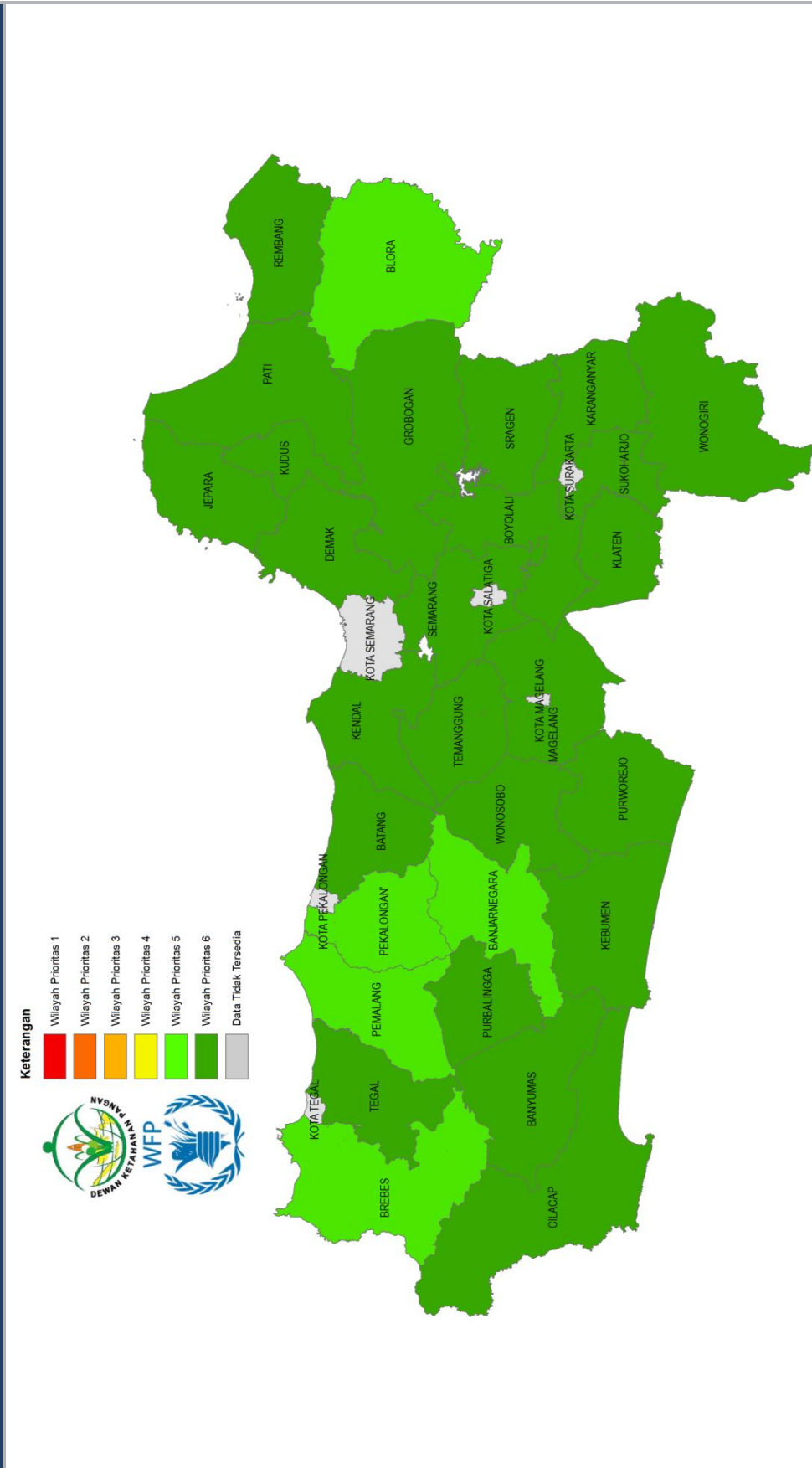
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Jawa Tengah Dalam Angka (BPS), 2010.

Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSA)"

KETAHANAN PANGAN

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi				Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)	
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/ kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)		Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
CILACAP	637	0,47	19,88	11,11	0,00	13,02	70,51	15,9	5,99	47,27	169,7
BANYUMAS	398	0,75	21,52	6,70	0,00	9,09	69,67	15,6	5,44	45,81	157,3
PURBALINGGA	415	0,72	24,97	10,54	0,00	11,21	69,94	16,6	0,00	45,65	124,1
BANJARNEGARA	524	0,57	21,36	6,35	0,00	16,22	68,88	18,7	1,80	57,57	147,4
KEBUMEN	521	0,58	25,73	8,14	0,00	12,85	69,26	19,1	5,43	52,91	178,3
PURWOREJO	661	0,45	17,02	6,41	0,00	12,64	70,27	13,8	7,69	37,56	161,8
WONOSOBO	671	0,45	25,91	5,93	0,00	14,03	69,74	19,9	11,32	27,07	216,0
MAGELANG	481	0,62	15,19	9,55	0,00	14,11	70,07	19,2	8,87	43,72	199,3
BOYOLALI	681	0,44	15,96	14,43	0,00	21,52	70,30	21,6	9,74	35,99	223,3
KLATEN	523	0,57	19,68	3,38	0,00	14,85	71,33	26,5	0,50	40,13	122,0
SUKOHARJO	590	0,51	11,51	0,50	0,00	13,92	70,17	16,9	2,40	29,21	117,8
WONOGIRI	1.298	0,23	19,08	7,49	0,00	25,39	72,21	13,2	1,36	45,66	141,3
KARANGANYAR	544	0,55	14,73	1,25	0,00	20,47	72,13	19,8	4,52	28,00	150,1
SRAGEN	950	0,32	19,70	5,70	0,00	18,91	72,37	22,8	4,33	26,78	158,5
GROBOGAN	1.433	0,21	18,68	1,68	0,00	17,98	69,57	14,8	9,29	51,92	189,1
BLORA	1.210	0,25	17,70	3,22	0,00	26,12	71,20	27,2	9,83	20,82	236,3

KETAHANAN PANGAN

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi				Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)	
	Produksi Bersih Serealia- Kab./Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif- Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)		Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
REMBANG	765	0,39	25,86	1,21	0,00	13,07	70,02	23,2	3,06	47,48	154,3
PATI	699	0,43	15,92	1,61	0,00	20,80	72,77	21,1	6,90	33,07	182,2
KUDUS	303	0,99	10,80	1,12	0,00	9,01	69,57	24,0	2,27	32,97	122,6
JEPARA	330	0,91	9,60	5,04	0,52	11,69	70,71	26,1	4,64	46,44	170,3
DEMAK	891	0,34	19,70	0,11	0,00	13,93	71,04	27,3	2,81	26,68	138,3
SEMARANG	433	0,69	10,66	1,94	0,00	11,14	72,40	17,3	3,83	26,07	127,5
TEMANGGUNG	865	0,35	15,05	1,94	0,00	9,97	72,43	18,0	5,54	26,97	145,4
KENDAL	549	0,55	16,02	2,25	0,00	17,23	68,10	18,4	3,51	18,98	126,8
BATANG	566	0,53	16,61	4,11	0,00	16,57	69,88	19,7	7,66	38,28	184,9
PEKALONGAN'	457	0,66	17,93	8,28	0,00	11,84	68,73	27,0	6,36	42,78	196,8
PEMALANG	495	0,61	22,17	23,82	0,00	13,20	67,46	28,1	7,66	54,64	240,7
TEGAL	421	0,71	13,98	10,12	0,00	19,33	68,49	22,3	5,57	48,95	184,8
BREBES	459	0,65	24,39	14,57	0,00	19,59	67,37	26,6	8,42	43,61	236,7
KOTA MAGELANG**			10,11	0,01	0,00	5,17	70,17	11,2	0,00	13,81	77,5
KOTA SURAKARTA**			14,99	0,01	0,00	6,79	72,07	20,3	0,00	18,91	87,3
KOTA SALATIGA**			7,82	0,13	0,00	7,01	70,92	11,9	0,00	18,10	81,8
KOTA SEMARANG**			4,84	1,36	0,00	5,23	72,07	17,7	0,56	18,79	85,5
KOTA PEKALONGAN**			8,56	0,02	0,00	7,03	70,16	24,1	0,00	43,32	100,7

KETAHANAN PANGAN

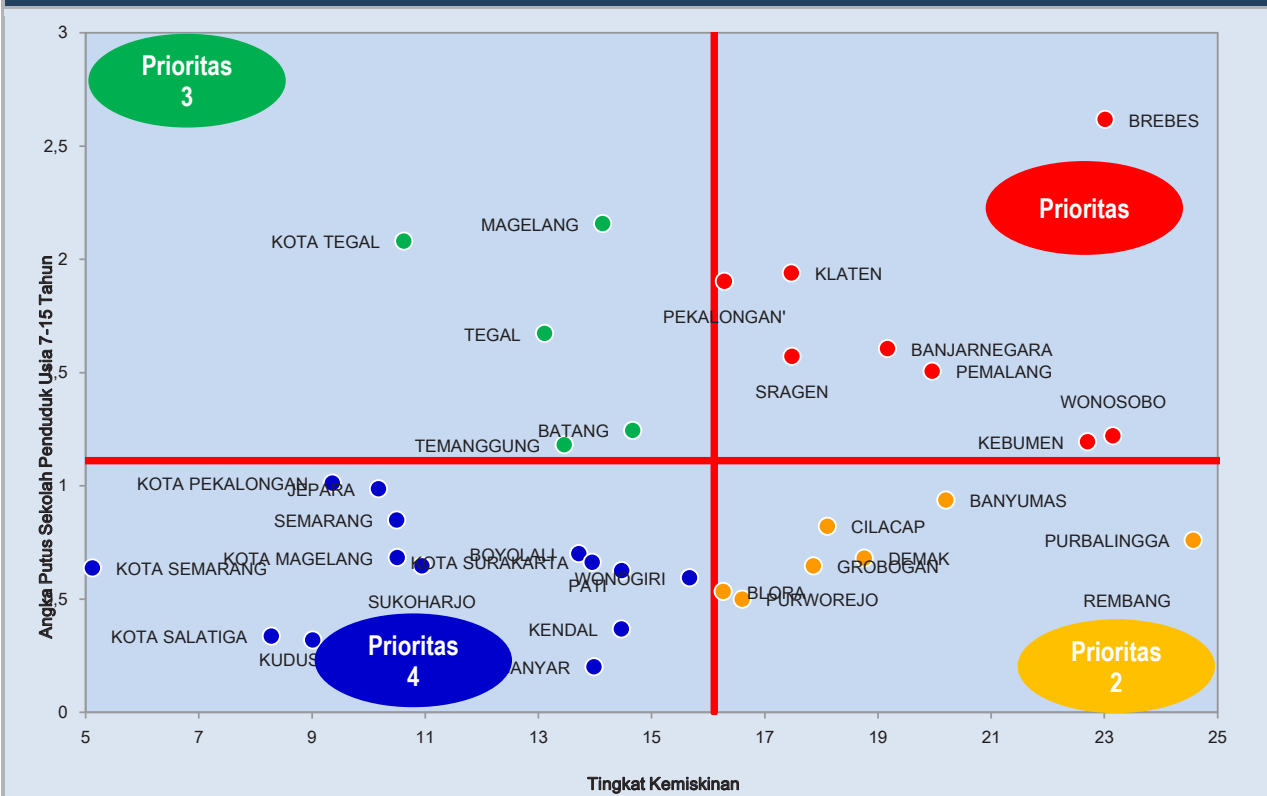
Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
KOTA TEGAL**			9,88	9,68	0,00	9,65	68,56	27,0	0,00	8,39	83,3

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

Keterangan: *Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah; ** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap. *** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

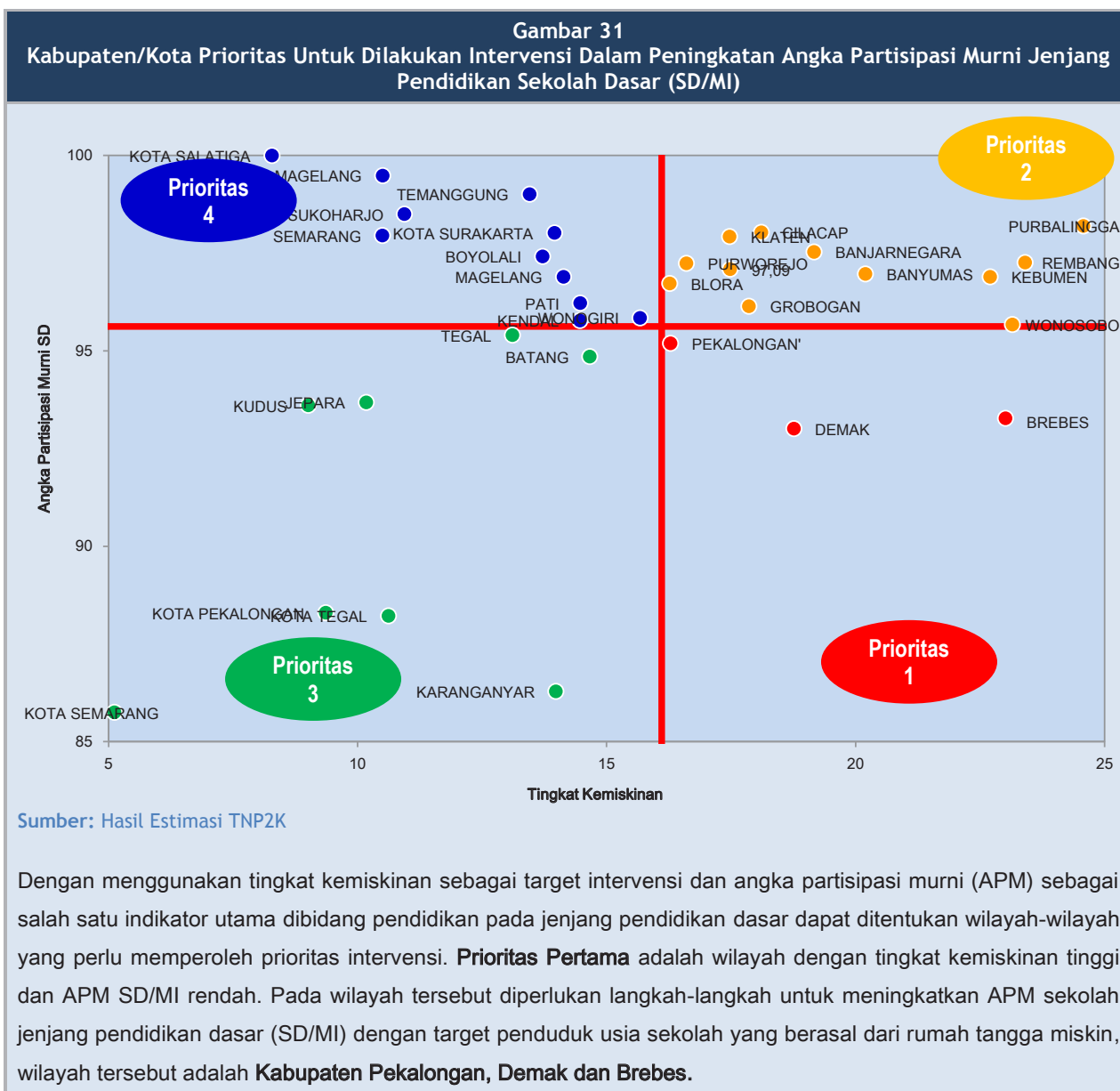
Gambar 30
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun



Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

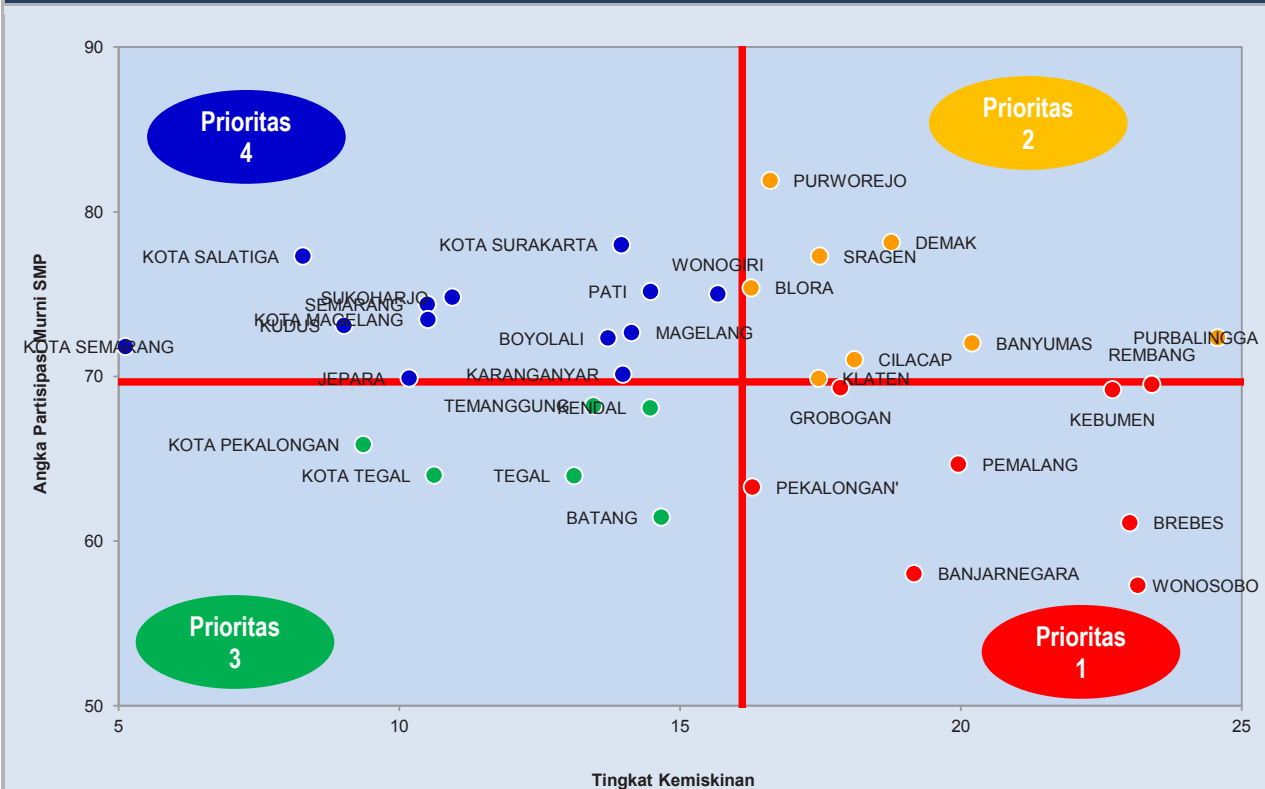
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. **Kabupaten Brebes, Klaten, Pekalongan, Sragen, Banjar Negara, Pemalang, Wonosobo dan Kebumen** merupakan wilayah Prioritas Pertama.

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

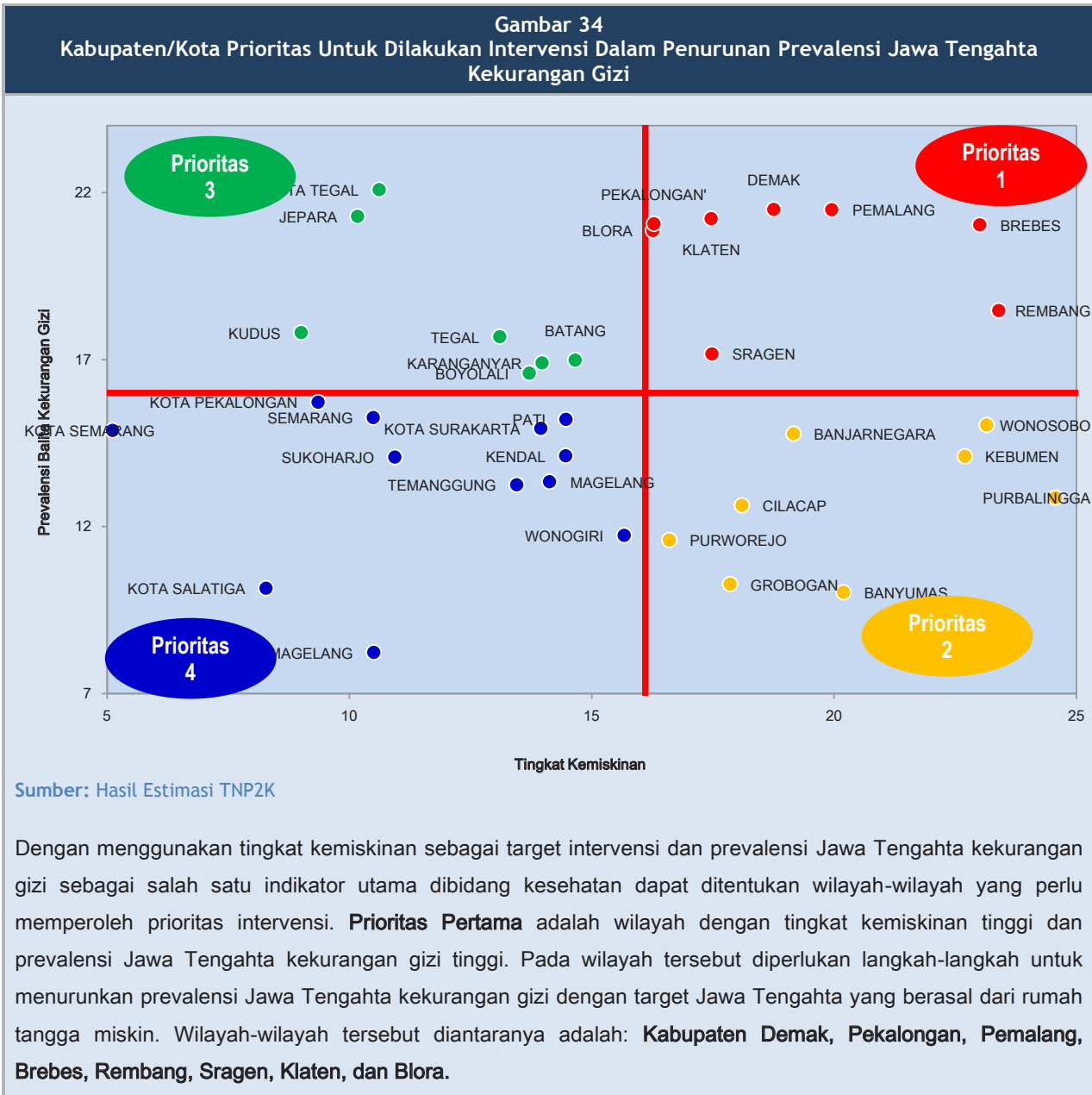
Gambar 32
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama



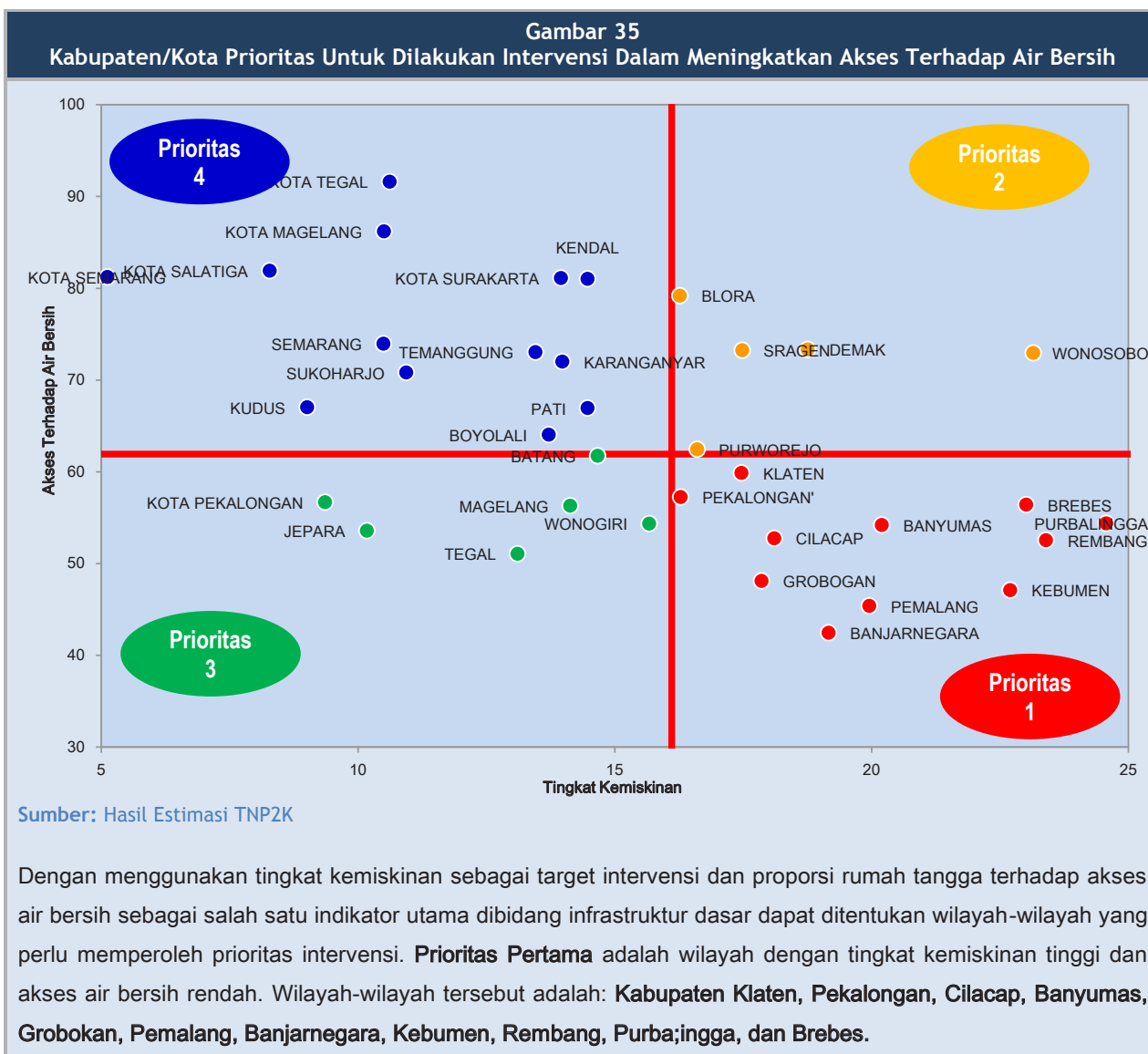
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Grobogan, Kebumen, Pemalang, Pekalongan, Banjar Negara, Wonosobo dan Brebes.**

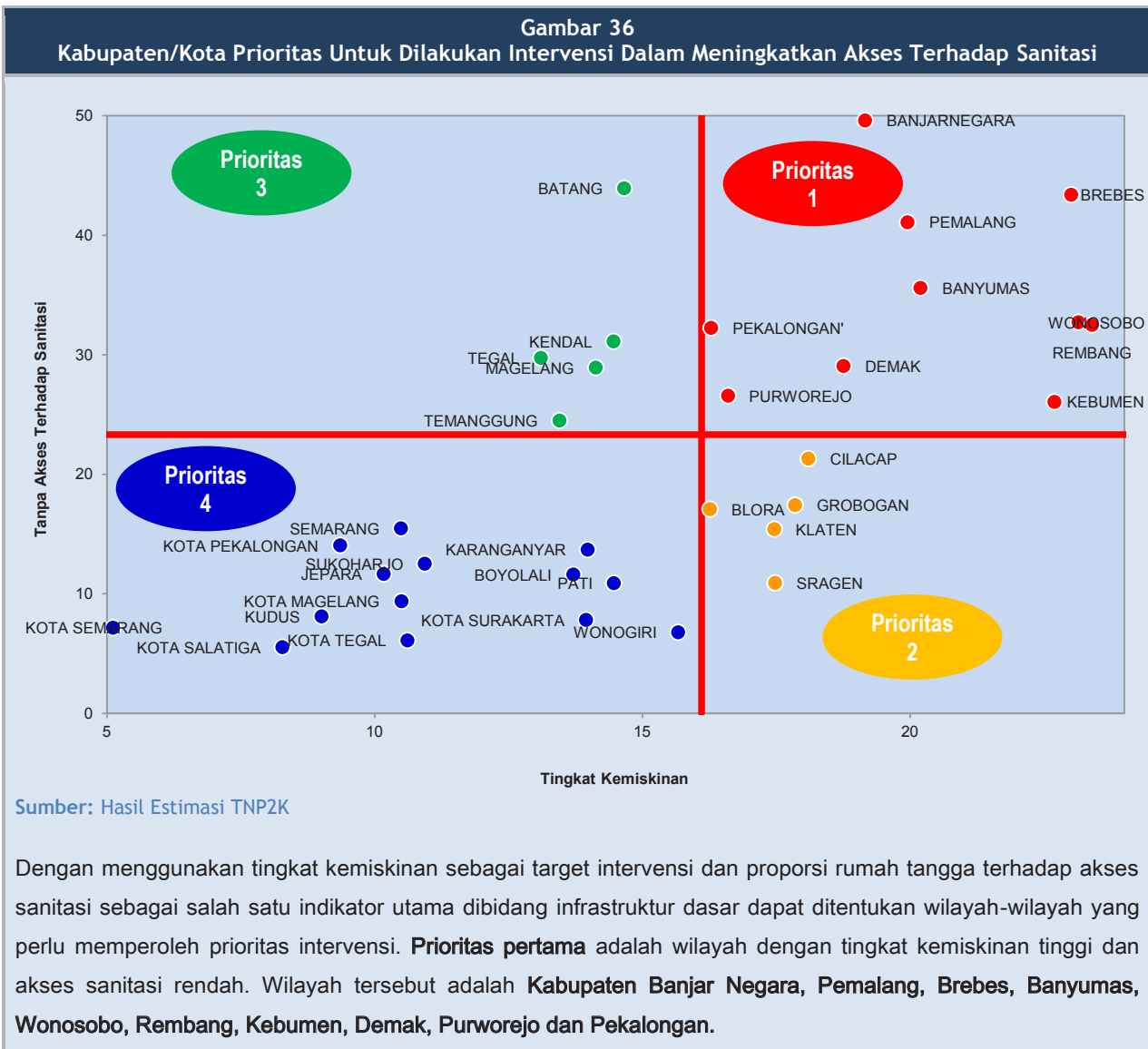
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



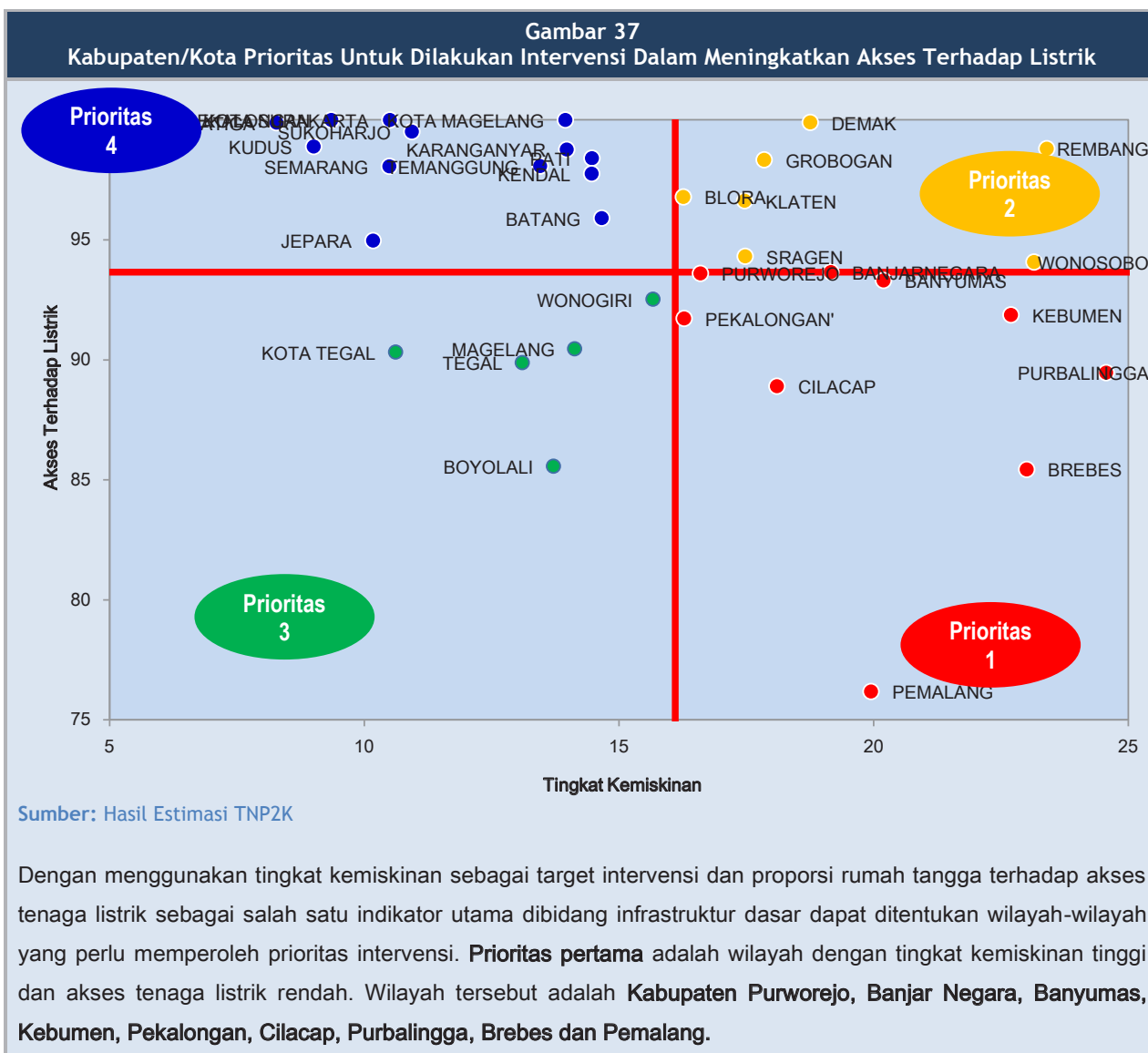
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

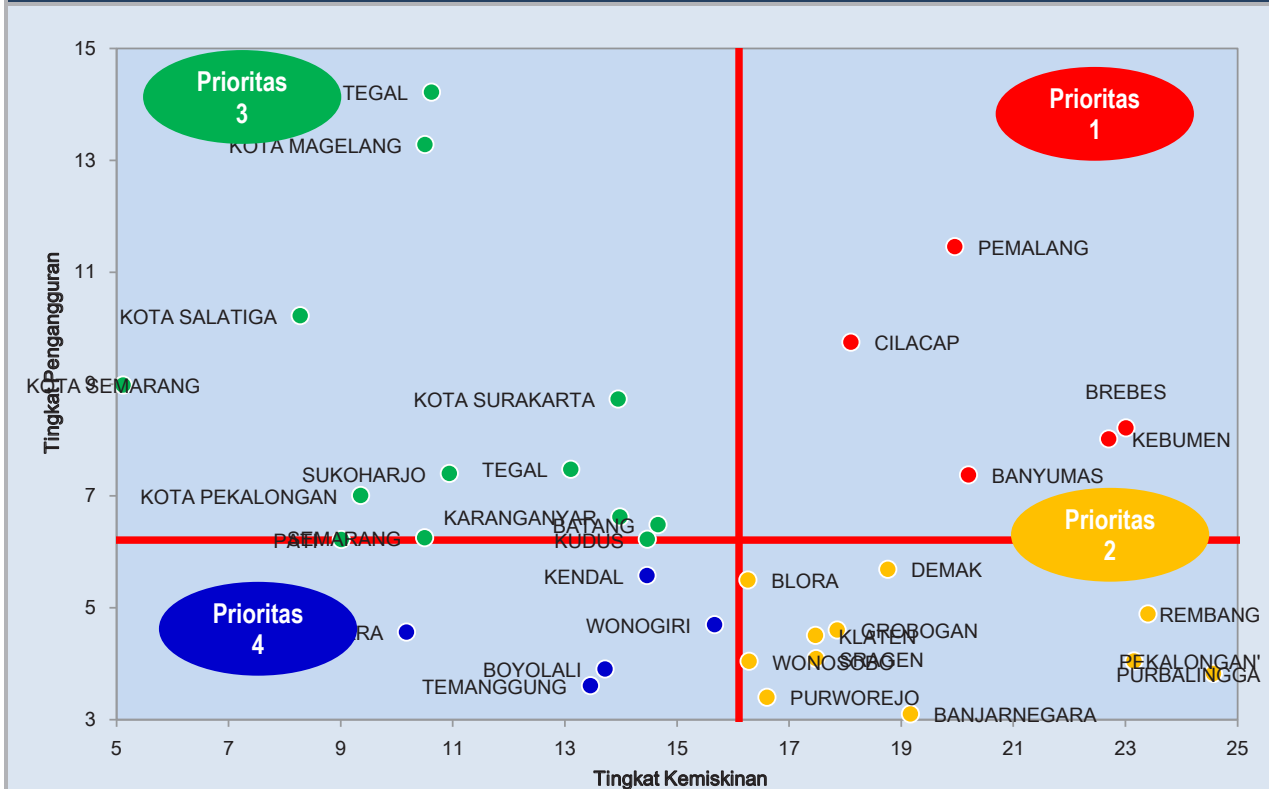


PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Gambar 38
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja



Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan tingkat pengangguran sebagai salah satu indikator utama dibidang ketenagakerjaan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat pengangguran tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menciptakan lapangan kerja dan investasi. Prioritas Kedua adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun tingkat pengangguran rendah. Pada wilayah ini diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya difokuskan pada permasalahan ketenagakerjaan. Wilayah tersebut diantaranya **Kabupaten Pemalang, Cilacap, Brebes, Kebumen, dan Banyumas.**

BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota⁷

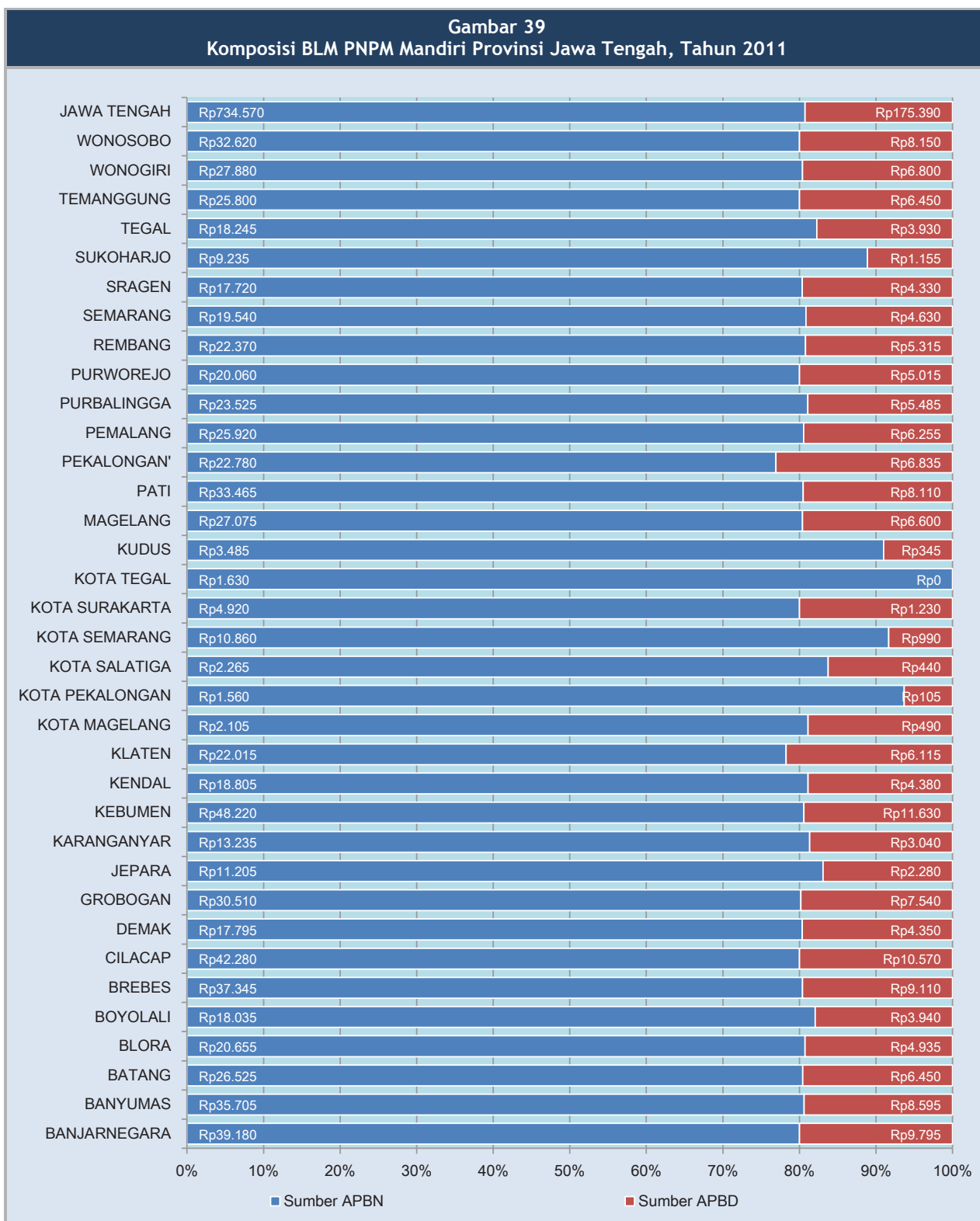
Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
BREBES	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEKALONGAN'	1	1	1	1	1	1	1	1	2
PEMALANG	1	2	1	1	1	1	1	1	1
KEBUMEN	1	2	1	1	2	1	1	1	1
BANJARNEGARA	1	2	1	1	2	1	1	1	2
BANYUMAS	2	2	2	1	2	1	1	1	1
REMBANG	2	2	1	1	1	1	1	2	2
CILACAP	2	2	2	1	2	1	2	1	1
DEMAK	2	1	2	1	1	2	1	2	2
PURBALINGGA	2	2	2	1	2	1	1	1	2
WONOSOBO	1	2	1	1	2	2	1	2	2
GROBOGAN	2	2	1	1	2	1	2	2	2
KLATEN	1	2	2	2	1	1	2	2	2
PURWOREJO	2	2	2	1	2	2	1	1	2
BLORA	2	2	2	1	1	2	2	2	2
SRAGEN	1	2	2	2	1	2	2	2	2
TEGAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3

⁷ Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.

BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengangguran
BATANG	3	3	3	3	3	3	3	4	3
KOTA TEGAL	3	3	3	3	3	4	4	3	3
KOTA PEKALONGAN	4	3	3	3	4	3	4	4	3
MAGELANG	3	4	4	3	4	3	3	3	4
JEPARA	4	3	4	3	3	3	4	4	4
KUDUS	4	3	4	3	3	4	4	4	3
BOYOLALI	4	4	4	3	3	4	4	3	4
KARANGANYAR	4	3	4	4	3	4	4	4	3
KENDAL	4	4	3	3	4	4	3	4	4
TEMANGGUNG	3	4	3	4	4	4	3	4	4
KOTA MAGELANG	4	4	4	3	4	4	4	4	3
KOTA SALATIGA	4	4	4	3	4	4	4	4	3
KOTA SEMARANG	4	3	4	4	4	4	4	4	3
SUKOHARJO	4	4	4	3	4	4	4	4	3
WONOGIRI	4	4	4	4	4	3	4	3	4
KOTA SURAKARTA	4	4	4	4	4	4	4	4	3
PATI	4	4	4	4	4	4	4	4	3
SEMARANG	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K



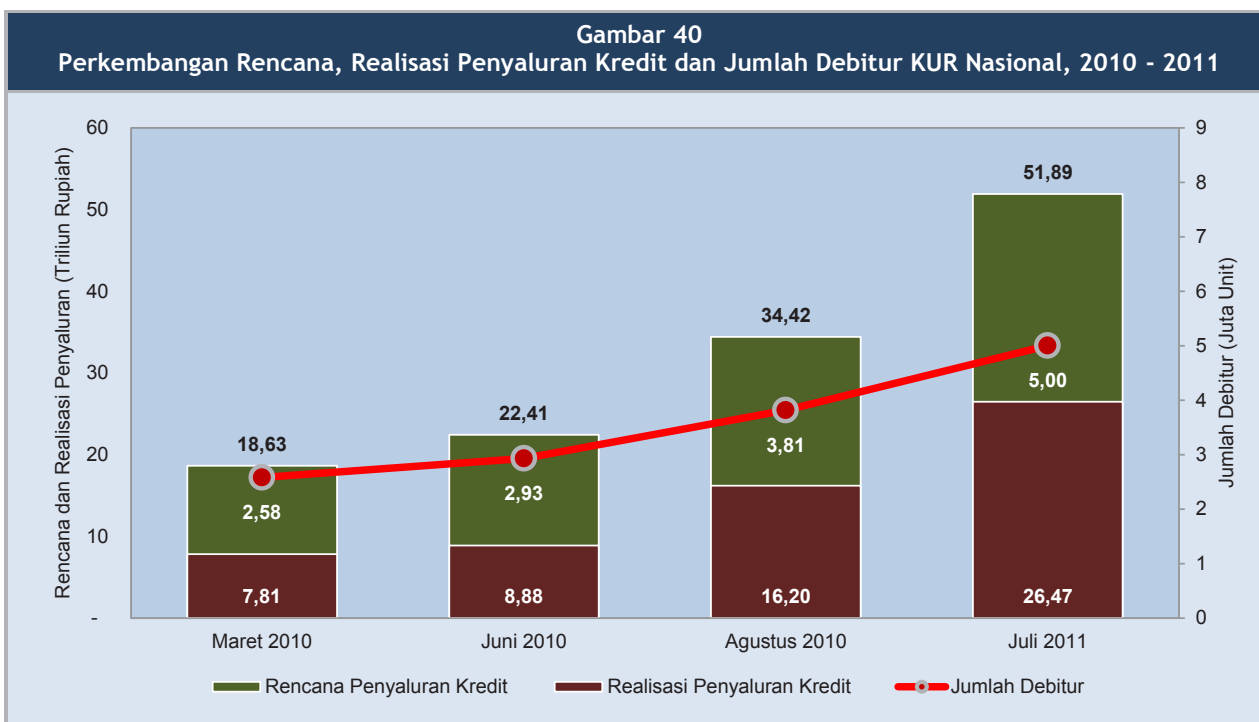
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

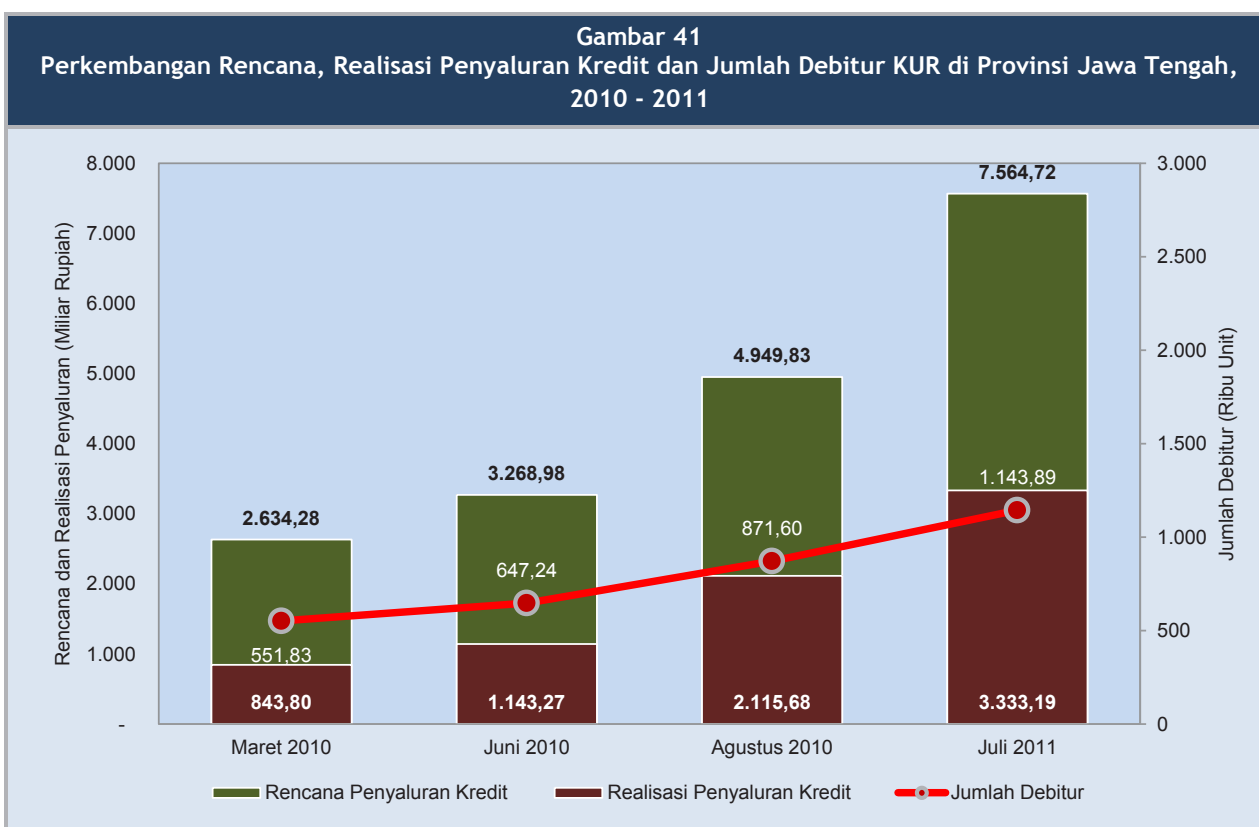
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BANJARNEGARA	46.600	2.375	48.975	39.180	9.795	20
BANYUMAS	37.500	6.800	44.300	35.705	8.595	27
BATANG	28.800	4.175	32.975	26.525	6.450	15
BLORA	21.600	3.990	25.590	20.655	4.935	16
BOYOLALI	18.500	3.475	21.975	18.035	3.940	19
BREBES	39.700	6.755	46.455	37.345	9.110	17
CILACAP	49.050	3.800	52.850	42.280	10.570	24
DEMAK	20.600	1.545	22.145	17.795	4.350	14
GROBOGAN	37.100	950	38.050	30.510	7.540	19
JEPARA	8.250	5.235	13.485	11.205	2.280	16
KARANGANYAR	13.600	2.675	16.275	13.235	3.040	17
KEBUMEN	52.200	7.650	59.850	48.220	11.630	26
KENDAL	17.650	5.535	23.185	18.805	4.380	20
KLATEN	8.250	19.880	28.130	22.015	6.115	26
KOTA MAGELANG		2.595	2.595	2.105	490	3
KOTA PEKALONGAN		1.665	1.665	1.560	105	4
KOTA SALATIGA		2.705	2.705	2.265	440	4
KOTA SEMARANG		11.850	11.850	10.860	990	16
KOTA SURAKARTA		6.150	6.150	4.920	1.230	5
KOTA TEGAL		1.630	1.630	1.630	0	4
KUDUS	1.350	2.480	3.830	3.485	345	9
MAGELANG	33.000	675	33.675	27.075	6.600	21
PATI	30.600	10.975	41.575	33.465	8.110	21
PEKALONGAN'	20.400	9.215	29.615	22.780	6.835	19
PEMALANG	21.800	10.375	32.175	25.920	6.255	14
PURBALINGGA	27.100	1.910	29.010	23.525	5.485	18
PURWOREJO	21.500	3.575	25.075	20.060	5.015	16
REMBANG	24.800	2.885	27.685	22.370	5.315	14
SEMARANG	22.950	1.220	24.170	19.540	4.630	19
SRAGEN	21.650	400	22.050	17.720	4.330	20
SUKOHARJO	3.450	6.940	10.390	9.235	1.155	12
TEGAL	16.950	5.225	22.175	18.245	3.930	18
TEMANGGUNG	26.950	5.300	32.250	25.800	6.450	20
WONOGIRI	34.000	680	34.680	27.880	6.800	25
WONOSOBO	37.600	3.170	40.770	32.620	8.150	15
JAWA TENGAH	743.500	166.460	909.960	734.570	175.390	573

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

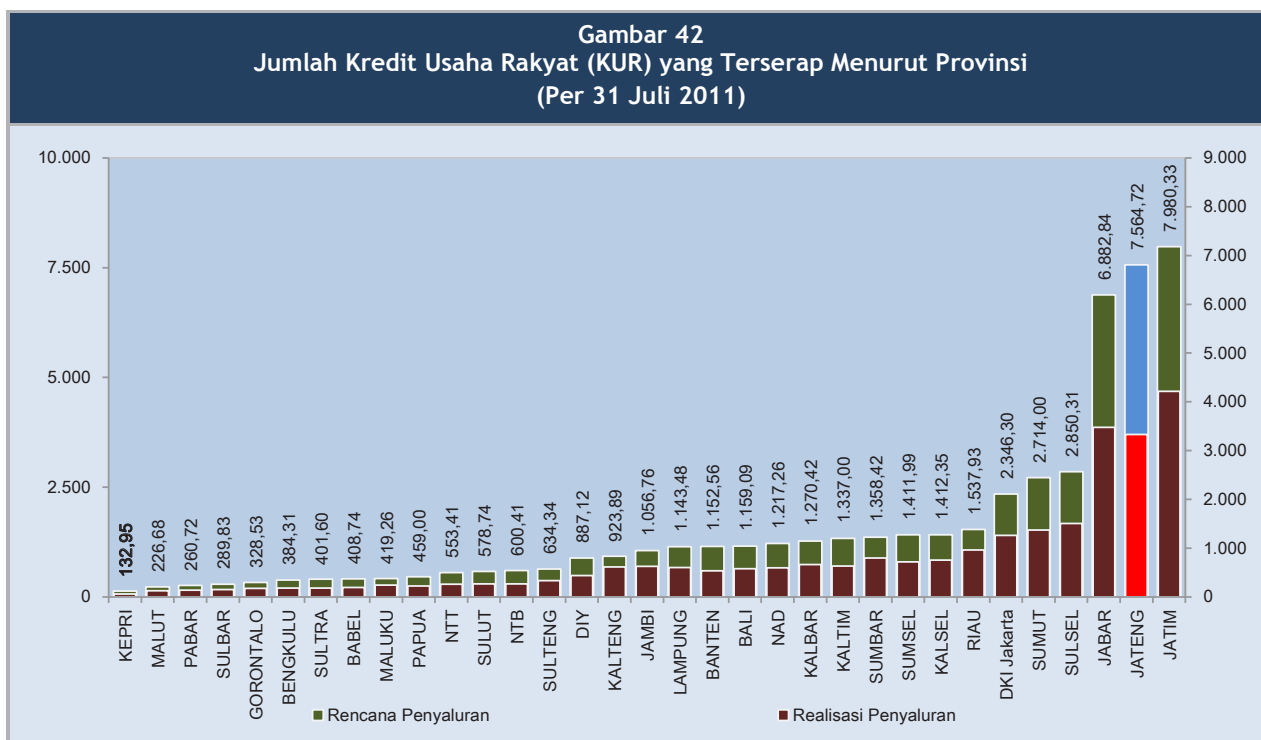


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

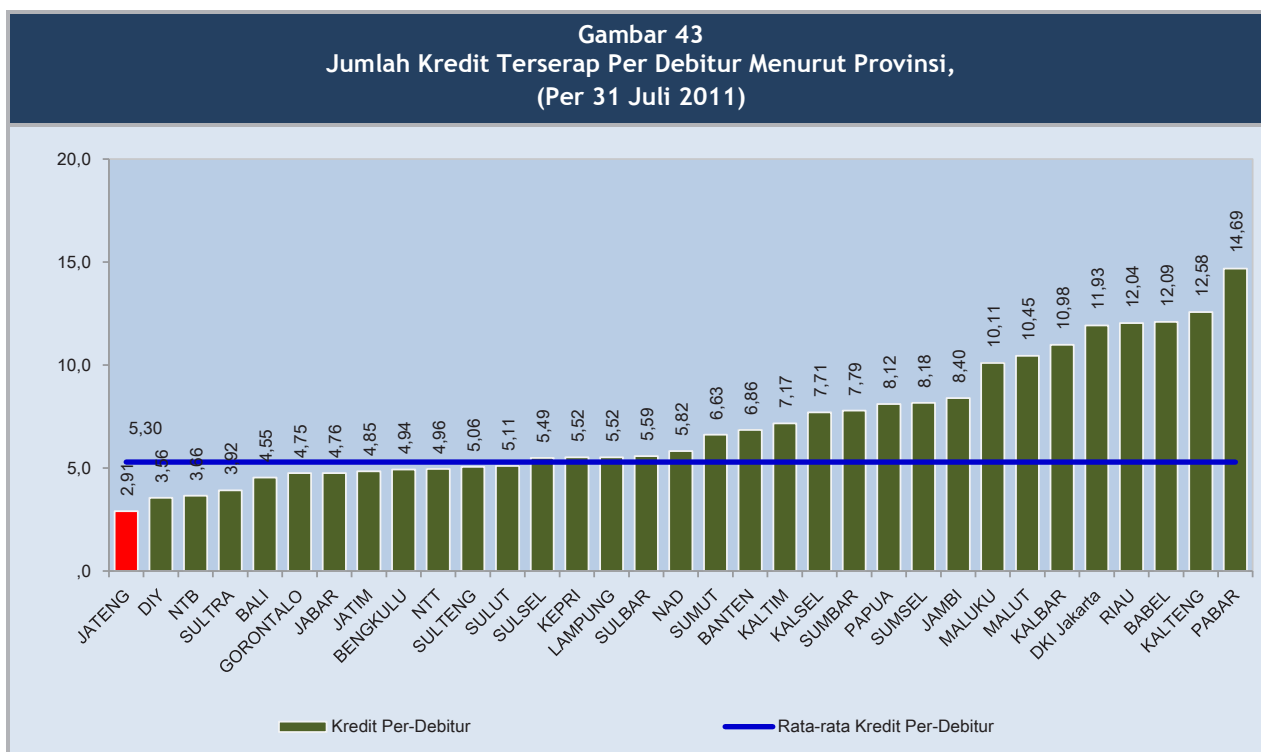


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

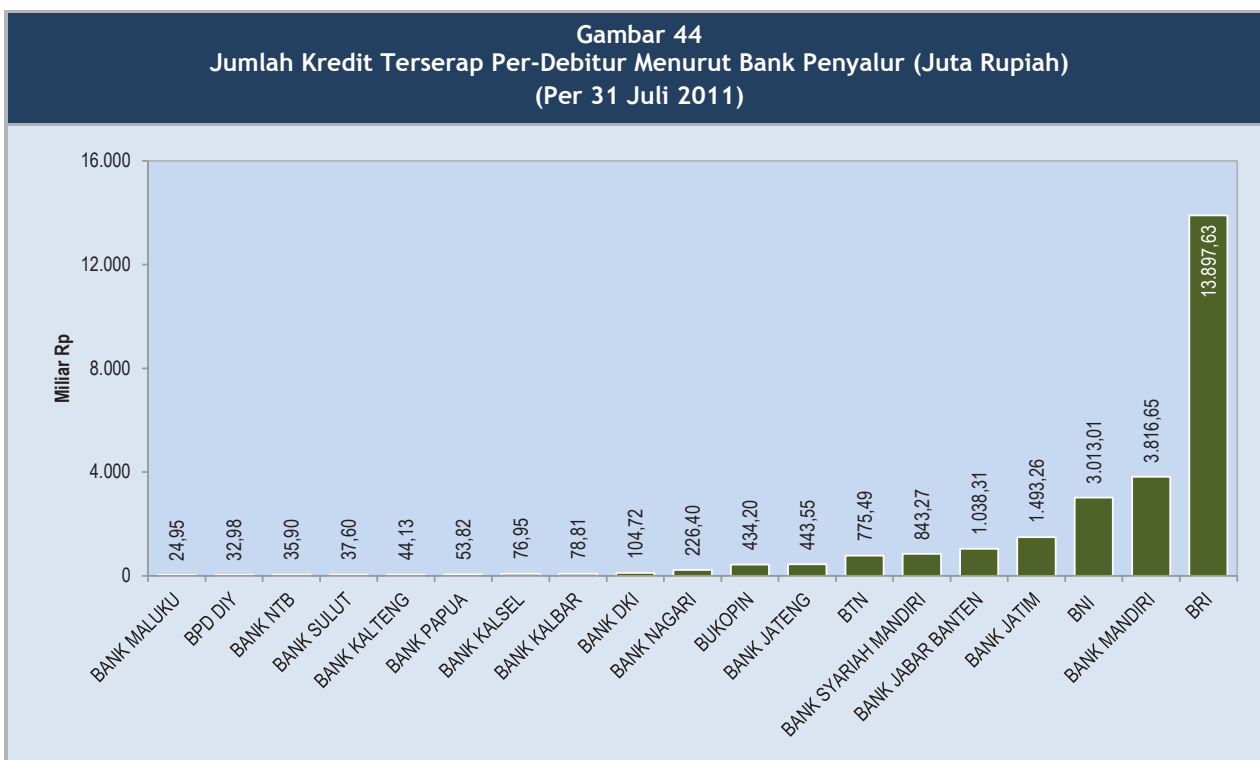


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

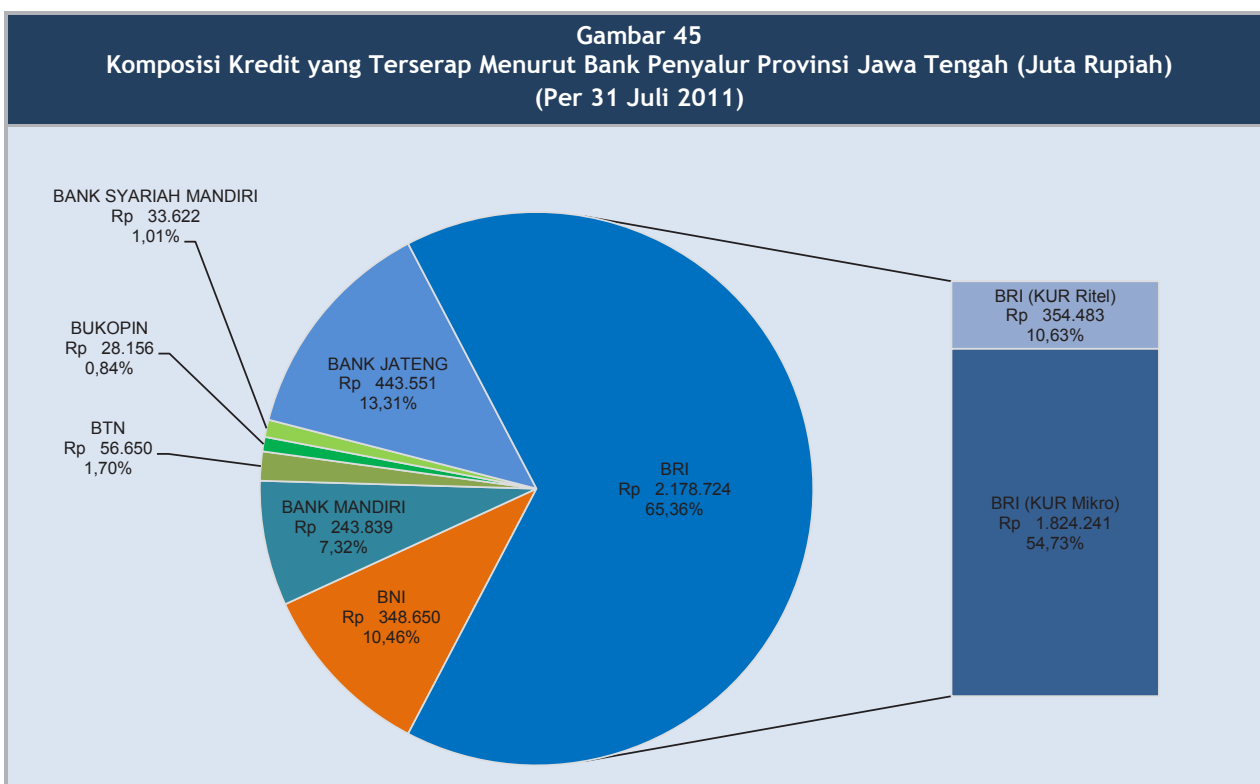


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

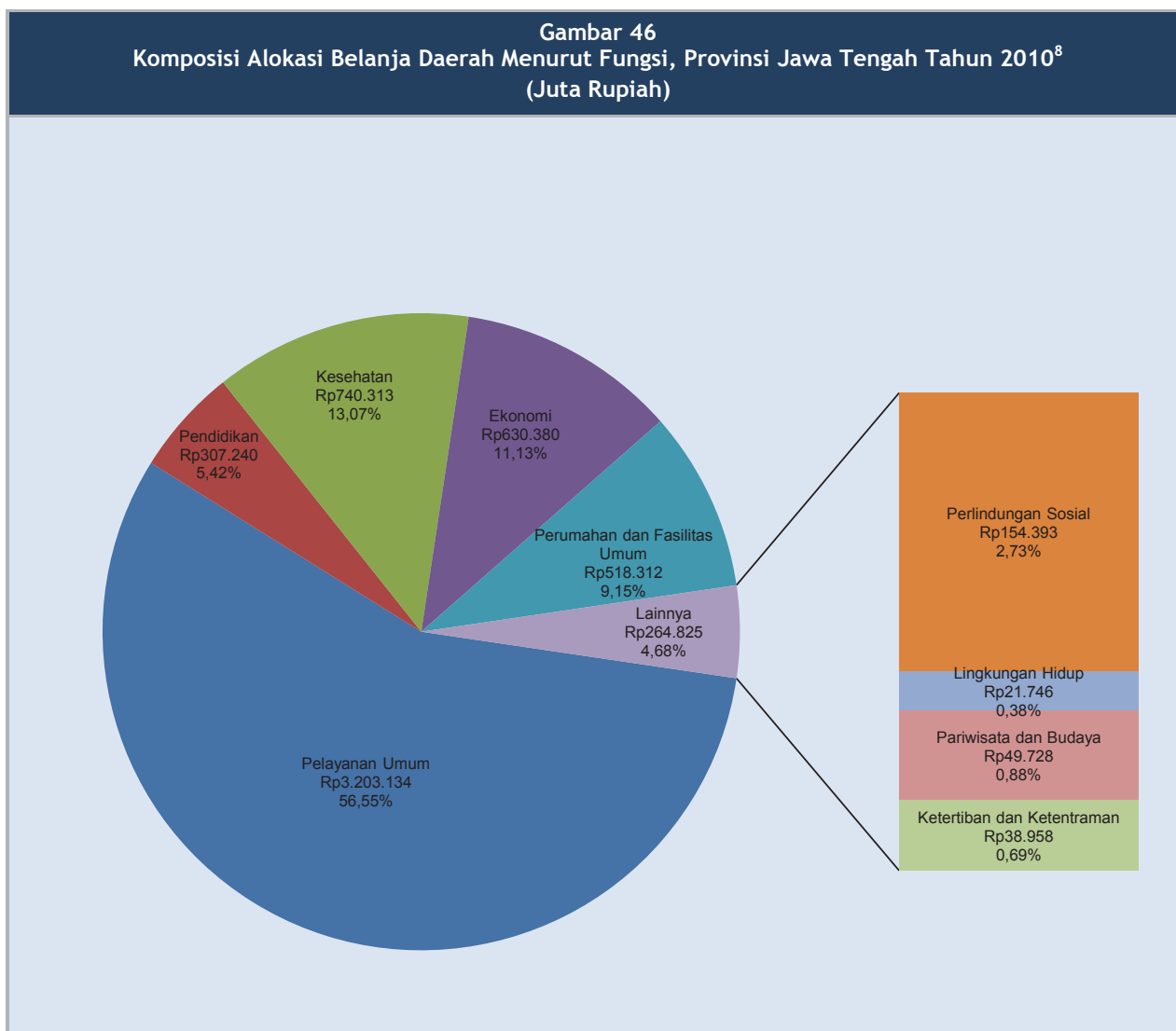
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011



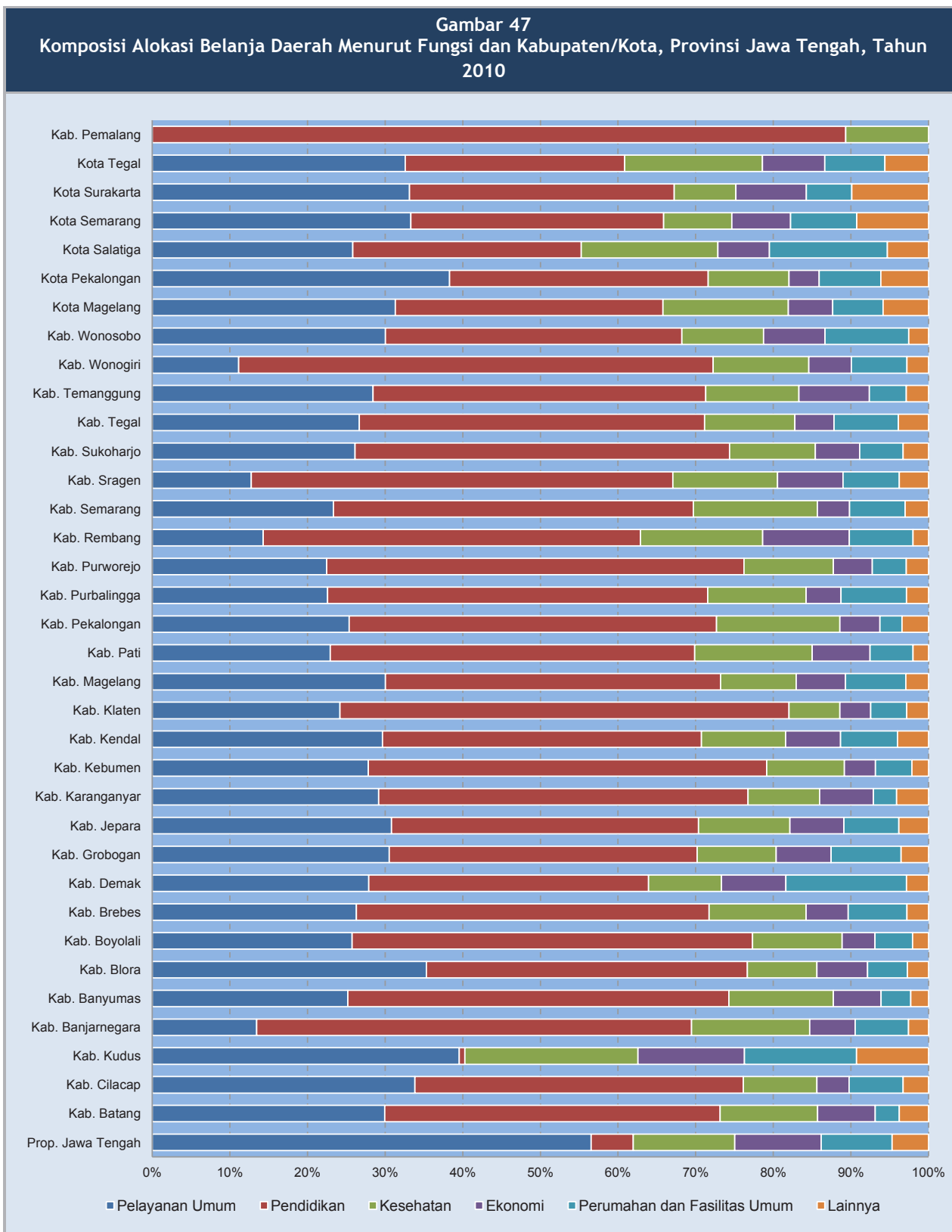
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

⁸ Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).

KEUANGAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010